

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
KERAJINAN ROTAN DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**KHAIRUN NISA
NIM. 170604046**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nam : Khairun Nisa
NIM : 170604046
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



Khairun Nisa

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

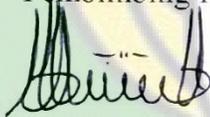
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Disusun Oleh

Khairun Nisa
NIM. 170604046

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, S.E., M. Si
NIP. 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Khairun Nisa
NIM: 170604046

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ilmu Ekonomi.

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Januari 2022
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua

Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M. Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II,

Marwiyati, S.E., MM
NIP. 197404172005012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : KHAIRUN NISA

NIM : 170604046

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

E-mail : 17060404@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KRU Skripsi

Yang berjudul: **Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 06 Januari 2022

Mengetahui,

Penulis

KHAIRUN NISA

NIM : 170604046

Pembimbing I

Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si

NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Jalilah, S.HI., M.Ag

NIDN.2008068803

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*****Man Jadda Waa Jadda*****

Siapa Yang Bersungguh-sungguh Pasti Akan Mendapat

***Jalani Apa yang Diinginkan Jika itu Membawa kepada Kebaikan
Tanpa Dihantui Rasa Ketakutan, Gapailah Impian Setinggi-
tingginya Tanpa Ada Kata Terlambat***

Niatkan Lillahi Ta'ala Insyaa Allaah Pasti Akan Tercapai...

Tidak Ada Proses yang Menghianati Hasil

Setiap Proses Pasti Akan Berhasil Dicapai

Terus Berjuang, Ikhtiar, Belajar dan Berdoa..

***Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda
saya yang tak pernah lelah yang selalu memberikan semangat,
motivasi, materi atau apapun itu. Saya mengucapkan beribu-ribu
terimakasih kepada kedua orang tua tercinta atas semua
pemberiannya yang tak sanggup saya balaskan.***

***Hanya doa yang mampu saya panjatkan kepada engkau Ibunda
dan Ayahanda agar selalu dalam Lindungan Allah SWT, selalu
dalam keberkahan, sehat badan, dan agar senantiasa bahagia
selalu..***

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Atas limpahan rahmat-Nya, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH KERAJINAN ROTAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi juga selaku penguji I dan Marwiyati, SE., M.M selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi juga selaku penguji II yang selalu mendukung, memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik maupun spiritual dan yang

telah meluangkan waktunya serta memberi saran dan juga arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku ketua Laboratorium Prodi Ilmu Ekonomi.
4. Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si selaku pembimbing I dan Jalilah, S. HI., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Hafas Furqani., M.Ec. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis serta Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
6. Seluruh pihak terkait yaitu pihak Diperindag atau PLUT Aceh Besar, Kantor Camat Lhoknga dan Pemerintahan Desa serta masyarakat Gampong Tanjong, Gampong Kueh, Gampong Lamcok, Gampong Lamgaboh serta pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta Ibunda Arwiati dan

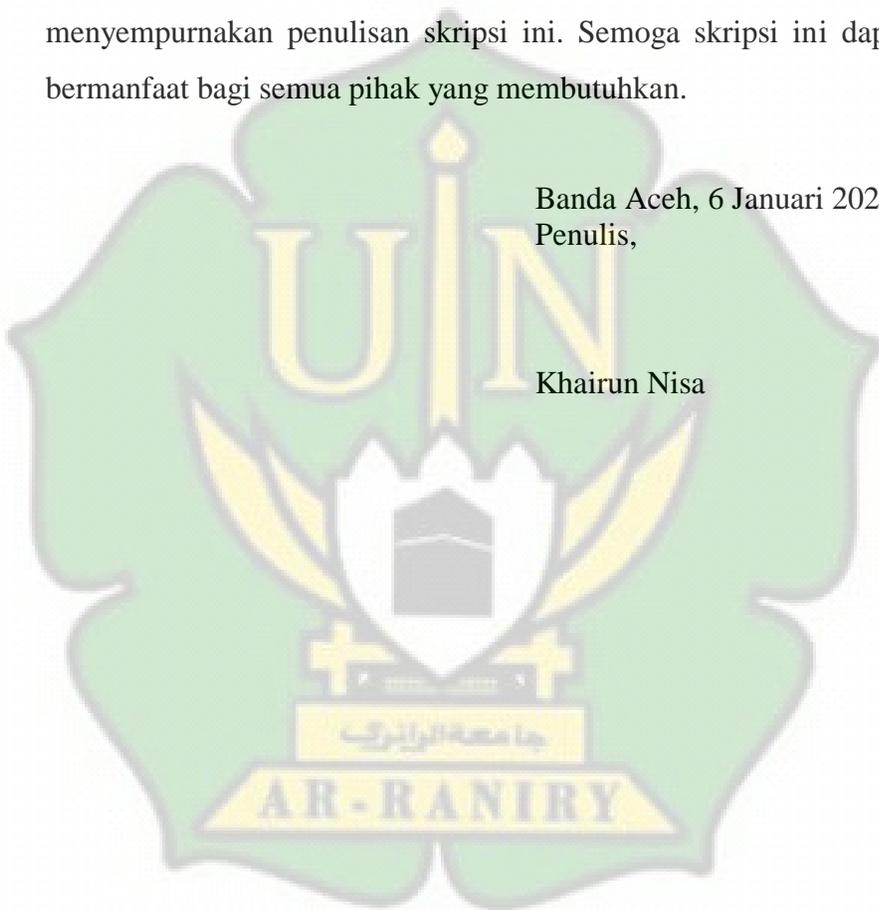
Ayahanda Azwar AR yang telah menjadi orang tua terbesar sejagat raya, telah bersusah payah membesarkan dan merawat penulis serta tidak pernah merasa letih dan lelah dalam memberikan kasih sayang dan dukungan yang luar biasa kepada penulis baik itu materi maupun doa-doa terbaiknya. Semoga menjadi amal jariah yang tidak pernah putus untuk keduanya. Terimakasih juga kepada Kakanda Zuhri, Munawir, Rudi Amsar, Khalati S.Pd., Eka Soraya Indriani S. Pd., Adinda Nabilatul Usra, dan keponakan tercinta (Ayra Lathifa, M. Hayyin Abqary, M. Hanan Askary) serta kakek tersayang Zainal Abidin Is yang selalu memberikan Doa, motivasi serta kasih sayang yang tentu tidak akan bisa terbalaskan dengan apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini pada waktu yang tepat.

8. Sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka selama perkuliahan dan selama penyusunan tugas akhir Riska Srimuliana S.E., Nur Basyariah S.E., Muammar S.E., T. Riski Syahputra S.E., Akmal S.E., Fitrianiyah S.E., Diana Aridaini S.Pd., Irfan Wahyudi S.E., Nabila Ulfa Yusuf, Irnanda S.Pd. dan Ilham Maulidi A.Md. Terima kasih juga kepada keluarga Unit 02 dan angkatan 2017 Prodi Ilmu Ekonomi atas segala dukungan, semangat dan motivasinya serta yang selalu mensupport kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktu yang tepat.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 6 Januari 2022
Penulis,

Khairun Nisa



TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa:

كيف

haul:

هول

3. **Maddah**

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla: قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūl: يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudatul al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْ لَأَصَّةُ طُفَالٍ
al Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah :
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah: طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Khairun Nisa
NIM : 170604046
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing I : Dr. Maimun,SE., Ak., M.Si
Pembimbing II : Jalilah, S.Hl., M.Ag

Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah kerajinan rotan bagi masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan perekonomiannya, maka sangat diperlukan adanya pemberdayaan oleh pihak terkait baik itu pemerintahan desa atau pemerintahan daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan dan dampak pemberdayaan usaha kecil kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi dengan jumlah responden berjumlah 17 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemberdayaan usaha kerajinan rotan ini telah dilakukan oleh pihak pemerintahan desa maupun dinas UMKM dan lainnya baik dari bentuk program kemitraan, pembinaan/pendampingan dan pembiayaan. Pemberdayaan usaha kerajinan rotan ini telah memberikan dampak positif walaupun masih terdapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Dampak positif yang dapat diperoleh yaitu pengrajin/pelaku usaha telah mampu meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat serta membantu akses bagi pengrajin atau pelaku usaha untuk dapat memasarkan produk yang telah dihasilkan.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi, UKM Kerajinan Rotan

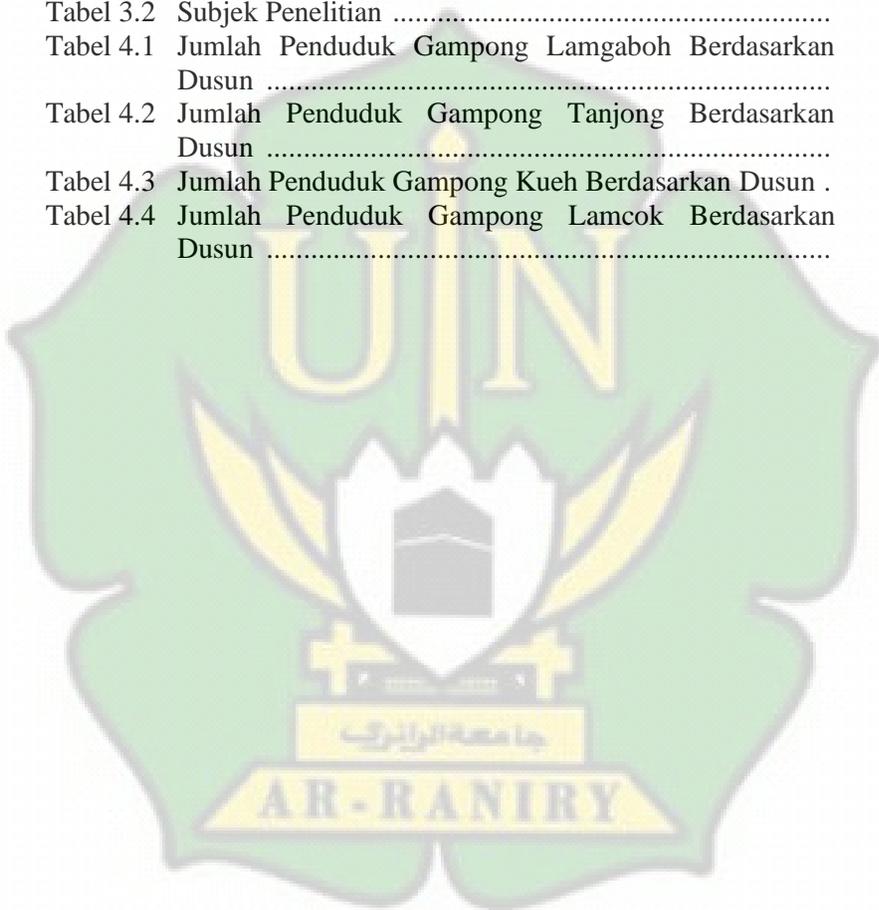
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
2.1 Pemberdayaan Ekonomi	13
2.1.1 Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	13
2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	19
2.1.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan	23
2.2 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	25
2.2.1 Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	25
2.2.2 Jenis - Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	28
2.2.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	29
2.2.4 Kendala Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	33
2.2.5 Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	38
2.3 Penelitian Terkait	44
2.4 Kerangka Pemikiran	48

BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Informan	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53
3.6 Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Penelitian	60
4.1.1 Gambaran Umum Gampong Lamgaboh	61
4.1.2 Gambaran Umum Gampong Tanjong	62
4.1.3 Gambaran Umum Gampong Kueh	63
4.1.4 Gambaran Umum Gampong Lamcok	64
4.2 Bentuk Pemberdayaan UKM Kerajinan Rotan	65
4.3 Dampak Pemberdayaan UKM Kerajinan Rotan	87
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	100
BIODATA PENULIS	108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Aceh	4
Tabel 2.1 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah PDB ADHB	30
Tabel 3.2 Subjek Penelitian	52
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Lamgaboh Berdasarkan Dusun	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Gampong Tanjong Berdasarkan Dusun	63
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Gampong Kueh Berdasarkan Dusun .	64
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Gampong Lamcok Berdasarkan Dusun	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Lokasi Kecamatan Lhoknga	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	100
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan menuju pada keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Pertumbuhan perekonomian ditandai apabila adanya peningkatan pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Kuncoro, 2001). Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari sektor pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Salah satu sektor yang dapat membantu perekonomian di Indonesia yaitu sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

Usaha Kecil Menengah mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan juga kebutuhan modal yang kecil (Susilo, 2015). Selain itu, usaha Kecil Menengah juga berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai ketika terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, dimana pada saat itu perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha yang dijalankannya. Usaha Kecil Menengah dapat mengatasi dan mengurangi jumlah pengangguran, dimana Usaha Kecil Menengah ini dapat membantu para pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Para pekerja ini dapat mengembangkan diri dalam dunia bisnis atau usaha yang tidak banyak membutuhkan modal, atau dapat mengembangkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki.

Usaha kecil menengah ini juga dapat mengentaskan kemiskinan, karena berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi bagi masyarakat yang lebih produktif dalam meningkatkan kesejahteraan untuk menikmati segala aspek kehidupan dan dapat meningkatkan derajat masyarakat. Keberadaan usaha kecil menengah sebagai kelompok pelaku ekonomi yang sangat besar berorientasi dalam perekonomian Indonesia sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi agar mengalami peningkatan.

Segi aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat terkait dengan keuntungan secara material atau benda, sedangkan dari

aspek sosial menunjuk kepada jangkauan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari keseluruhan struktur ekonomi, dari 39,72 juta pengusaha yang ada saat ini, sekitar 39,71 juta atau 99,97% adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekitar 98% dari jumlah itu didominasi oleh pengusaha atau wirausaha (Hadiman, 2016).

Salah satu usaha kecil menengah di wilayah Indonesia yang potensinya telah meningkatkan pertumbuhan perekonomian yaitu Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung pulau Sumatera dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Aceh dikenal sebagai kawasan kepulauan beriklim tropis yang memiliki keberagaman potensi ekonomi seperti dalam pengembangan bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan, minyak bumi dan gas (migas), bidang industri, sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari potensi air, panas bumi, batubara, daerah produksi pertanian, kawasan kehutanan, penghasil mineral dan bahan bakar. Selain itu Aceh juga merupakan wilayah yang memiliki potensi usaha kecil menengah sangat besar yang terus berkembang hingga saat ini. Usaha Kecil Menengah telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan perekonomiannya meningkat.

Berikut jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Aceh tahun 2016-2020:

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Aceh tahun 2016-2020

Tahun	Banyaknya Usaha
2016	75.207
2017	99.277
2018	114.042
2019	106.918
2020	212.632

Sumber: BPS Aceh dan Dinas Koperasi dan UKM Aceh 2020

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2016, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh sebanyak 75.207 usaha. Tahun 2017, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh sebanyak 99.277 usaha, jika dibandingkan dengan tahun 2016 adanya peningkatan sebesar 0,20 %. Tahun 2018 jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh sebanyak 114.042 usaha, jika dibandingkan dengan 2017 adanya peningkatan sebesar 0,15 %. Tahun 2019 jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh sebanyak 106.918, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadinya penurunan sebesar 0,80 %, sedangkan pada tahun 2020 jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh sebanyak 212.632 usaha, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadinya peningkatan yang sangat pesat sebesar 10,6 %. Umumnya kegiatan yang diusahakan adalah usaha makanan dan minuman, usaha tekstil (kerajinan

sulaman/bordir), usaha pakaian jadi, usaha bahan dari kayu, usaha anyaman dari rotan, bambu dan sebagainya.

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Aceh dengan luas wilayah 2.903,49 KM² dengan jumlah kecamatan 23 dan jumlah desa senilai 604 desa serta jumlah penduduk sebanyak 425,216 jiwa. Potensi yang dimiliki yaitu sektor perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan energi, pariwisata, perdagangan, industri pengolahan seperti kerajinan tangan, dan lainnya. Salah satu daerah di kabupaten Aceh Besar terdapat kerajinan tangan yang dapat menghasilkan dan memproduksi produk berkualitas serta bernilai tinggi adalah di Kecamatan Lhoknga. Berikut peta lokasi Kecamatan Lhoknga: (BPS Aceh Besar, 2020)



Sumber : BPS Aceh Besar, 2020

Gambar 1.1 Peta Lokasi Kecamatan Lhoknga

Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar seluas wilayah sebesar 87,95 KM² (8.795 Ha) yang menjadi ibukota kecamatan yaitu Moen Ikeun. Jumlah kemukimannya ada 4 mukim, yaitu Mukim Lhoknga, Mukim Kueh, Mukim Lam Lhom, dan Mukim Lampuuk. Kecamatan Lhoknga terdapat 28 Gampong (Desa) dengan jumlah kependudukan 17.391 jiwa. Sumber mata pencaharian masyarakat Lhoknga sebagian besar sebagai petani, pekebun, peternak, buruh, PNS/TNI/POLRI, pedangang (pelaku usaha atau pengrajin kerajinan rotan, kelontong), dan lainnya (BPS Aceh Besar, 2020). Kecamatan Lhoknga terdapat usaha kerajinan tangan berupa kerajinan olahan dari rotan. Usaha kerajinan rotan ini merupakan usaha kecil menengah yang sebagian besar digeluti oleh masyarakat di Kecamatan Lhoknga. Bahan utama kerajinan rotan berasal dari bahan baku lokal yaitu Lhoknga, Leupung, Ligan, Krueng Raya, Lamteuba, Seulimum dan dari luar daerah yaitu Medan, Cirebon, Kalimantan. Ada 3 (tiga) jenis bahan baku rotan, yaitu rotan petrit, rotan slimit, dan rotan seukeum.

Hasil olahan dari kerajinan rotan terdiri dari beberapa produk yaitu berupa tas, koper, tempat bola lampu listrik, tudung saji, tempat kue, tempat ikan, keranjang parcel, vas bunga, tempat cucian, kursi, meja, keranjang buah, keranjang baju, kap lampu, dan berbagai alat kebutuhan rumah tangga. Semua produk kerajinan rotan ini dikerjakan secara langsung oleh para pengrajin/pelaku usaha yang memiliki keterampilan dalam

menganyam rotan. Produk rotan ini yang paling banyak terdapat di 4 (empat) Desa/Gampong di Kecamatan Lhoknga, yaitu Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, Gampong Lamcok dan Gampong Tanjong. Potensi usaha kerajinan rotan ini sangat besar dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan juga adanya peningkatan pelaku usaha/pengrajin dari tahun ke tahun.

Melihat betapa pentingnya peran Usaha Kecil Menengah kerajinan rotan bagi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian, maka sangat diperlukan adanya pemberdayaan oleh pihak pemerintah atau pemerintah daerah untuk ikut mendukung sektor usaha ini agar mendapat perhatian, pengawasan, pelatihan, sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi yang kuat dan lebih maju. Pemberdayaan ialah suatu proses menyeluruh, proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat perlu adanya pemberdayaan yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan/keahlian, pemberian berbagai kemudahan serta peluang dalam mencapai akses sumber daya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Sumodiningrat dan Wulandari, 2015).

Pemberdayaan usaha kecil menengah diarahkan dapat menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi melalui penguatan dunia kewirausahaan dan penambahan produktivitas yang didukung oleh dengan adanya beberapa upaya seperti fasilitas, sarana dan prasarana, dan dukungan oleh pemerintah

(Hikmat, 2006). Pengaruh dari pemberdayaan usaha kecil menengah dapat dilihat dari peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan usaha kecil menengah dan memperoleh hasil positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sisi lain, usaha kecil menengah juga terdapat adanya hambatan, seperti terbatasnya modal, minimnya kualitas keahlian pekerja, dan kurangnya penguasaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pemberdayaan usaha kecil menengah. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan, karena usaha kecil menengah sangat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian daerah yang berwawasan kemandirian serta berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fibriyanti (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan pengembangan UMKM kerajinan anyaman yaitu adanya peningkatan keterampilan pengrajin dalam menghasilkan produk, peningkatan daya saing pada produksi kerajinan anyaman, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Nurullah (2017) menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha bersama motekar membawa perubahan yang berdampak positif melalui kegiatan-kegiatan dalam proses produksi dan pemasaran, upaya-upaya untuk meningkatkan usaha dengan pengadaan pelatihan, pembinaan/pendampingan dan jaringan usaha, serta hasil yang diperoleh dapat meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Suprpto (2016) menunjukkan bahwa pengrajin telah melakukan peningkatan jumlah produksi, peningkatan pendapatan, telah mampu melakukan pengupload-an gambar produk ke website, telah mampu melakukan transaksi online, dan telah mampu menyusun laporan keuangan sederhana setiap perbulannya. Berdasarkan rujukan penelitian tersebut, Usaha Kecil dan Menengah kerajinan rotan yang telah berjalan dan memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat sehingga dapat dilaksanakan pemberdayaan agar para pengrajin atau pelaku usaha dapat mengembangkan usaha rotan yang telah dijalankan. Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak terkait baik pemerintahan daerah atau pemerintahan desa diharapkan dapat membantu para pengrajin rotan dan berdampak positif yang dirasakan oleh para pengrajin dalam menjalankan Usaha Kecil dan Menengah kerajinan rotan sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah mengenai **“Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pemberdayaan usaha kecil menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimanakah dampak pemberdayaan usaha kecil menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan usaha kecil menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan usaha kecil kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti atau studi berikutnya serta dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti penelitian yang serupa mengenai pemberdayaan usaha kecil menengah kerajinan tangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah yang berkaitan mengenai pemberdayaan usaha kecil menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat membantu pihak pemerintah atau lembaga-lembaga terkait/stakeholder dalam menyusun atau mengambil kebijakan atau keputusan dalam hal pemberdayaan usaha kecil menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya program pemberdayaan yang diterapkan pihak-pihak terkait/stakeholder.

1.5. Sistematika Penelitian

Adapun susunan sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan landasan teori pemberdayaan ekonomi, usaha kecil menengah, hasil penelitian terkait dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, responden, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai objek penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bermanfaat dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Ekonomi

2.1.1 Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kata pemberdayaan berasal dari daya bermakna kekuatan pada kemampuan bertindak atau untuk mengerjakan sesuatu. Pada kamus Bahasa Inggris pemberdayaan diartikan sebagai *empowerment* yang ditinjau dari aspek etimologi berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan (Papilo, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan merupakan suatu proses untuk berdaya, cara memiliki kekuatan dan tenaga dalam menguasai sesuatu. Pemberdayaan ialah suatu proses menyeluruh, proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat perlu adanya pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan peningkatan pengetahuan, ketrampilan/keahlian, pemberian berbagai kemudahan serta peluang dalam mencapai akses sumber daya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Sumodiningrat dan Wulandari, 2015).

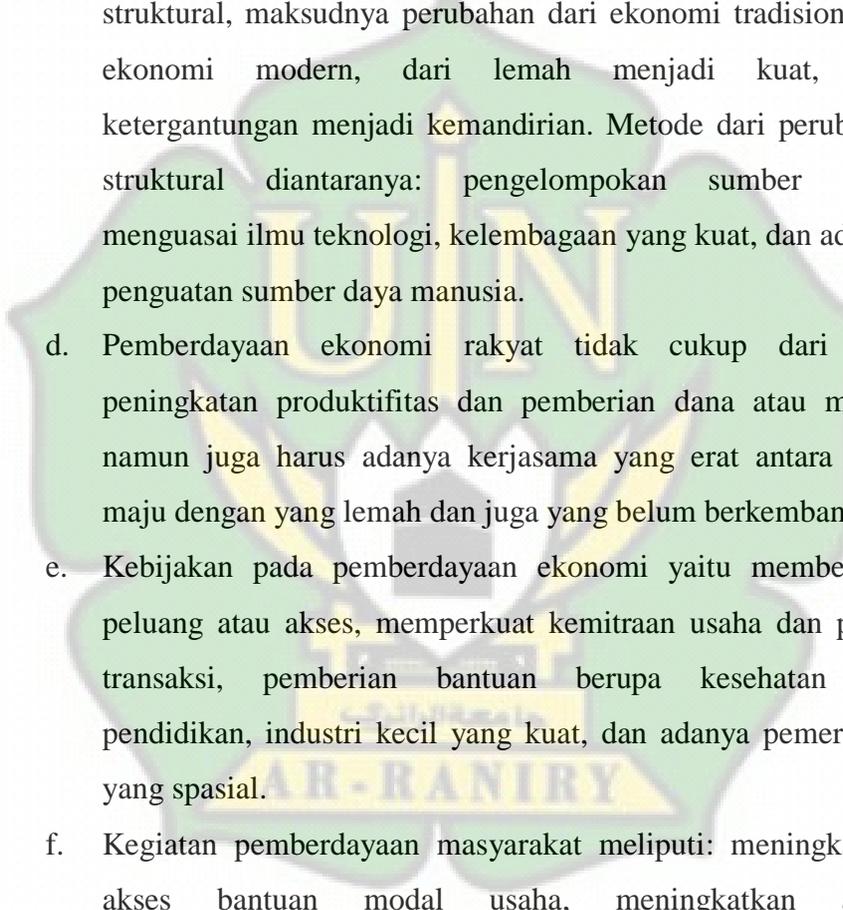
Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mengembangkan seseorang/individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menuju berdaya sebagai upaya dalam mencapai taraf kehidupan yang baik. Pemberdayaan sebenarnya sebuah alternatif dari pembangunan yang dirancang berdasarkan cara pandang modernisasi. Pemberdayaan merupakan

pembangunan yang disusun secara demokratis, desentralistik, dan partisipatoris. Masyarakat sebagai posisi utama dalam memulai, mengelola, dan menikmati pembangunan. Negara sebagai fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi, dan institusi lokal (Papilo, 2014).

Menurut Hermansyah (2013), pemberdayaan ialah suatu upaya atau usaha yang dapat dilakukan pada pengembangan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta mengetahui potensi yang dimiliki dan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam menyelesaikannya. Pemberdayaan juga merupakan proses bertahap yang dilakukan dalam rangka memperoleh dan meningkatkan daya sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri (Winarni, 2008). Pemberdayaan ekonomi yaitu suatu perwujudan dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar terlepas dari keterbelakangan dan perangkap kemiskinan serta dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat (Basith, 2012).

Menurut Hutomo (2000), ada beberapa konsep pemberdayaan ekonomi, yaitu:

- a. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian yang dilakukan oleh rakyat yang berakar pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

- 
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu usaha dalam menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing yang tinggi.
- c. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui perubahan struktural, maksudnya perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari lemah menjadi kuat, dari ketergantungan menjadi kemandirian. Metode dari perubahan struktural diantaranya: pengelompokan sumber daya, menguasai ilmu teknologi, kelembagaan yang kuat, dan adanya penguatan sumber daya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup dari segi peningkatan produktifitas dan pemberian dana atau modal, namun juga harus adanya kerjasama yang erat antara yang maju dengan yang lemah dan juga yang belum berkembang.
- e. Kebijakan pada pemberdayaan ekonomi yaitu memberikan peluang atau akses, memperkuat kemitraan usaha dan posisi transaksi, pemberian bantuan berupa kesehatan dan pendidikan, industri kecil yang kuat, dan adanya pemerataan yang spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi: meningkatkan akses bantuan modal usaha, meningkatkan akses pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung ekonomi masyarakat lokal.

Umumnya pemberdayaan memiliki unsur-unsur tertentu, berikut unsur pemberdayaan yang terdiri atas: (Sajuwitaningtyas, 2014)

1. Pendamping, yang meliputi bagian dari komponen lembaga-lembaga, instansi-instansi, atau dunia usaha dalam proses pemberdayaan. Pendamping memiliki fungsi sebagai:
 - a. Pelayan, yaitu yang memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pemberdayaan.
 - b. Inovator, yaitu fasilitator yang mampu menggerakkan dan mengajak masyarakat binaan dengan strategi tertentu agar adanya perubahan sikap dan pola pikirnya ke arah yang inovatif.
 - c. Motivator, yaitu seseorang yang dapat memberikan suatu motivasi terhadap orang lain agar dapat bergerak, adanya pendorong, dan dapat melaksanakan sesuatu kegiatan.
 - d. Konsultan, yaitu seorang ahli yang berprofesi sebagai pemberi nasihat, petunjuk ataupun pertimbangan dalam suatu kegiatan.
 - e. Dinamisator, yaitu fasilitator yang memiliki pola pikir dalam pembaruan di bidang pengembangan masyarakat.
2. Wadah Pemberdayaan, meliputi lembaga/kelompok masyarakat, jenis dan bentuk kelompok sesuai dengan program yang dilakukan.
3. Kegiatan Pemberdayaan, yaitu sebagai upaya yang dilakukan pada proses pemberdayaan masyarakat.

Menurut Mardikanto (2013), ada beberapa tujuan pemberdayaan yang meliputi upaya perbaikan-perbaikan, antara lain:

- a. Perbaikan kelembagaan, perbaikan tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki suatu kelembagaan salah satunya pengembangan hubungan kemitraan usaha.
- b. Perbaikan pendapatan, perbaikan tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki penghasilan ataupun pendapatan salah satunya pendapatan masyarakat atau keluarga.
- c. Perbaikan usaha, perbaikan tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki usaha yang dilakukan salah satunya melalui perbaikan aksesibilitas dan perbaikan semangat belajar (pendidikan).
- d. Perbaikan lingkungan, kerusakan-kerusakan lingkungan biasanya seringkali disebabkan oleh faktor minimnya pendapatan dan faktor kemiskinan, maka perbaikan tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki lingkungan baik secara sosial maupun fisik.
- e. Perbaikan kehidupan, perbaikan tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki kehidupan keluarga atau masyarakat agar keadaan lingkungan dan pendapatan menjadi lebih baik.
- f. Perbaikan masyarakat, perbaikan tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki masyarakat agar mampu

mengatasi segala permasalahan kehidupan dan mencukupi kebutuhannya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun pada intervensi pekerjaan sosial tidak semua dapat dilakukan secara kolektifitas. Dalam konteks pekerjaan sosial, strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga matra (aras) yang terdiri atas: (Suharto, 2009)

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *criss intervention*.

b. Aras Mezzo

Pemberdayaaan yang dilakukan dengan cara kelompok-kelompok sebagai media intervensi, pendidikan, dan pelatihan.

c. Aras Makro

Strategi aras makro memandang bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memahami situasi-situasi yang dialami dan dapat memilih serta menentukan strategi yang tepat dalam melakukan tindakan.

Menurut Hikmat (2006), yang menjadi dimensi dalam mengukur pemberdayaan melalui indikator-indikator yaitu: fasilitas, sarana dan prasarana, dan dukungan oleh pemerintah. Menurut Suharto (2004), pemberdayaan terdapat dimensi-dimensi yang menjadi indikator pengukuran yang terdiri dari: kekuatan

(*empowering*), melindungi (*protecting*), dukungan (*supporting*), dan pengembangan (*fostering*).

2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat meningkatkan perekonomian secara produktif sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan nilai tambah yang besar. Perolehan nilai tambah diperlukan adanya upaya peningkatan kemampuan masyarakat. Ekonomi masyarakat yaitu suatu kegiatan dan upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan agar memperoleh kesejahteraan yang baik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya dalam meningkatkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat pada kegiatan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung proses pembangunan nasional (Sukalele, 2014). Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan, faktor-faktor produksi, pemasaran, distribusi, masyarakat dalam memperoleh upah/gaji, pengetahuan dan ketrampilan yang dilakukan secara multi aspek, baik itu aspek masyarakatnya maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000).

Menurut Soetomo (2011), pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang dapat memberikan kesempatan dan kewenangan yang besar terhadap masyarakat terutama masyarakat lokal dalam mengelola proses pembangunan. Penetapan sasaran

bentuk pola pemberdayaan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sangat diperlukan. Sasaran bentuk pola pemberdayaan yang tepat yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah ditentukan serta diberi kekuasaan atau kewenangan dalam mengatur dana. Proses pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan tiga pilar utama, yaitu pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yaitu suatu konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial yang bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable*. Pemberdayaan dilakukan agar dapat terbentuknya individu dan masyarakat agar menjadi mandiri. Kemandirian yang ingin dicapai yaitu baik dari berfikir, bertindak, dan pengendalian apa yang akan dilakukan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya dalam memandirikan atau memampukan masyarakat yang dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu: (Fahrudin, 2012)

1. *Enabling*, menciptakan iklim atau suasana yang dapat memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
2. *Empowering*, meningkatkan kapasitas untuk memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. *Protecting*, melindungi dan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat sebagai subjek pengembangan.

Menurut Mubarak (2010), pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan yang dimiliki oleh suatu komunitas yang mampu dilakukan sesuai dengan harkat dan martabat dalam melakukan tanggung jawab serta hak-haknya sebagai pelaku anggota masyarakat. Berikut upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat berjalan, diantaranya:

1. Upaya mempersiapkan pribadi masyarakat agar menjadi wirausaha. Program pembinaan agar seseorang menjadi wirausaha dilakukan dengan memberikan motivasi moril, bentuknya adalah:
 - a. Pelatihan Usaha
 - b. Permodalan
2. Pendidikan, bentuk pemberdayaan pada sektor ini dilakukan melalui:
 - a. Pemberian beasiswa
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana.

Pemerintah memiliki wewenang sangat besar dalam mendukung pelaku UKM melalui kebijakan-kebijakan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan mengenai UKM yang bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan atau kebijakan perundang-undangan yang meliputi beberapa aspek, yaitu: (Rahmadani, 2019)

1. Pendanaan, sebagai perluasan sumber pendanaan dan memberi fasilitasi bagi Usaha Kecil dan Menengah agar dapat mengakses kredit di perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank.
2. Sarana dan Prasarana, sebagai penyediaan prasarana umum agar dapat mengembangkan dan mendorong pertumbuhan UKM.
3. Informasi Usaha, sebagai mempermudah dan membentuk jaringan informasi usaha.
4. Kemitraan, sebagai perwujudan kemitraan antar usaha besar dengan UKM.
5. Perizinan Usaha, sebagai penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha menggunakan sistem pelayanan terpadu.
6. Kesempatan Berusaha, sebagai penentuan peruntukan tempat usaha dalam pemberian lokasi-lokasi.
7. Promosi Dagang, sebagai peningkatan promosi produk UKM di luar maupun dalam negeri.
8. Dukungan kelembagaan, sebagai perwujudan struktur perekonomian nasional agar berkembang, berkeadilan, dan seimbang.

Menurut Cornelis dan Miar (2005), mengemukakan bahwa pada konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat dua strategi, yaitu:

1. Pemberian peluang kepada masyarakat agar sektor usaha menjadi modern dan tetap maju (pendekatan deregulasi).

2. Pemberdayaan sektor ekonomi masyarakat yang masih tertinggal dan hidup diluar atau dipinggiran jalur kehidupan modern.

2.1.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Andini (2015), dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti memberikan pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, pemberian modal serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat tentu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu: sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, globalisasi dan kemajuan teknologi sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.

Menurut Margayaningsih (2018), kegiatan pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor yang dapat menghambat kegiatan pemberdayaan antara lain:

1. Anggaran

Anggaran yaitu suatu rencana atau rancangan dana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas usaha

dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

2. Sarana dan Pra-Sarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan pra-sarana diharapkan kegiatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dapat membantu masyarakat dalam mengaktualisasi kemampuan atau keterampilan yang dimiliki.

Beberapa faktor yang mendukung berjalannya kegiatan pemberdayaan antara lain:

1. Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan eksternal dan internal pada diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya minat dan hasrat, kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghormatan dan penghargaan. Dalam pemberdayaan motivasi sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat menumbuhkan semangat dalam melaksanakan kegiatan usaha.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan-kebijaksanaan yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya merupakan suatu arahan atau bentuk dukungan atau pengawasan dan perhatian kepada masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan usaha.

2.2 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

2.2.1 Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai (Tambunan, 2012). Menurut Rahmadani (2019), Usaha Kecil dan Menengah merupakan suatu sektor usaha yang bersifat padat karya dan juga sebagai sektor dalam memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan sosial ekonomi, dimana sektor ini memiliki nuansa kesederhanaan serta dapat dikerjakan oleh masyarakat yang kekurangan modal dan tidak memiliki keterampilan dalam mengelola usaha yang bersifat padat modal maupun secara formal. Berikut pengertian tentang Usaha Kecil Menengah yang dipaparkan oleh beberapa lembaga yaitu:

1. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil Menengah yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha tertentu yang secara mayoritas dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Pengertian Usaha Kecil Menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja yaitu entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Menurut Nuari (2010), berikut terdapat ciri-ciri Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu:

- a. Bahan baku mudah diperoleh.
- b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
- c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.
- d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- e. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
- f. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis.

Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam Bab IV pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria usaha kecil menengah yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Anoraga (2010), menyatakan bahwa secara umum usaha kecil dan menengah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan administrasi relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Pembukuan kadangkala tidak di up to date sehingga sulit dalam menilai kinerja usahanya.
2. Rendahnya margin usaha mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal yang terbatas.
4. Terbatasnya pengalaman manajerial dalam mengelola usaha.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

2.2.2 Jenis - Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pada umumnya jenis dan bentuk dari usaha kecil menengah selalu bervariasi tergantung konsep yang digunakan namun di setiap negara tak selalu sama. Pengelompokan kegiatan usaha kecil menengah pada prinsipnya terdapat tiga jenis usaha yaitu: (Wibowo, 2003)

1. Perdagangan atau Distribusi

Jenis usaha ini merupakan usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang membutuhkan. Jenis usaha ini diantaranya bergerak di bidang pertokoan, warung, rumah makan, peragenan, penyalur, pedagang perantara, tengkulak, dan sebagainya. Komisioner dan makelar dapat juga dimasukkan dalam kegiatan perdagangan karena kegiatannya dalam jual-beli barang.

2. Produksi atau Industri

Jenis usaha ini merupakan usaha yang berjalan terutama pada kegiatan cara mengubah barang atau bahan menjadi suatu bentuk yang berbeda dan sifatnya memiliki nilai tambah. Jenis

usaha ini diantaranya industri pakaian, industri pangan, industri peralatan rumah tangga, industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri sektor pertanian, industri periklanan, industri peternakan, industri perkebunan, dan lainnya.

3. Komersial atau Keuangan

Jenis usaha ini merupakan usaha yang berjalan pada kegiatan pelayanan berupa jasa yang dibayarkan. Jenisnya seperti perbankan, asuransi, konsultan, pariwisata, ekspedisi (pengiriman barang), travel (biro perjalanan), bengkel, salon kecantikan, gedung, bioskop atau perfilman, penginapan, arsitektur (perencanaan bangunan), praktek dokter, dan lainnya.

2.2.3 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia

Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia merupakan suatu sektor usaha yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Dimana sektor UKM telah dijadikan sebagai prioritas utama pada pembangunan ekonomi yang telah terbukti bertahan pada tahun 1998 saat terjadinya krisis ekonomi maupun krisis moneter. Kegiatan usaha UKM dapat bertahan karena sebagian besar UKM dapat memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.

Secara keseluruhan jumlah UKM mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik, dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto relatif sangat besar (Latumaerissa, 2015). Berikut data perkembangan UKM di Indonesia berdasarkan jumlah usaha dan jumlah PDB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010-2018:

Tabel. 2.1
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah PDB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2018

Tahun	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah PDB atas Dasar Harga Berlaku (dalam Milyar Rupiah)
2010	52.769.426	Rp5.285.290
2011	54.119.971	Rp6.068.762
2012	55.211.396	Rp7.445.344
2013	56.539.560	Rp8.241.864
2014	57.900.787	Rp9,014,951
2015	59.267.759	Rp1.014.134
2016	61.656.547	Rp11.712.450
2017	62.928.077	Rp12.840.859
2018	64.194.057	Rp14.838.300

Sumber : djkn.kemenkeu.go.id (2020)

Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang sangat kuat dikarenakan banyaknya jumlah UKM dan juga daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Basis UKM juga terbukti sangat kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha Kecil dan Menengah juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pihak pemerintah menyadari akan potensi UKM, maka pemerintah melakukan atau menerapkan kebijakan agar meningkatnya kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Kebijakan tersebut yaitu bunga pinjaman yang bersubsidi, pemberlakuan restrukturisasi kredit, adanya pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan (djkn.kemenkeu.go.id, 2020).

Pihak pemerintah mengambil kebijakan tersebut agar dapat memajukan kekuatan keuangan UKM, namun terdapat berbagai permasalahan struktural pada UKM sehingga perlu diatasi. Permasalahan tersebut diantaranya kualitas dan kontinuitas produksi, akses pemasaran, packaging product, kualitas SDM/pelaku UKM di bidang manajerial, keuangan dan produksi. Penyelesaian permasalahan tersebut merupakan kunci utama yang berada pada pihak pemerintah daerah baik kabupaten dan kota, karena pihak pemerintah daerah mengetahui apapun yang dialami dan memiliki akses langsung dengan UKM. Maka untuk mengatasinya pihak pemerintah daerah melakukan kerjasama baik dengan Bank Indonesia atau perbankan lain, perguruan tinggi,

kemetrician, pemerintahan pusat, dan pihak lembaga lainnya (djkn.kemenkeu.go.id, 2020).

Usaha Kecil Menengah pada perspektif perkembangannya dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu: (Rahmana, 2008)

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Berdasarkan persaingan komparatif berikut beberapa faktor yang dapat mendorong perkembangan UKM di Indonesia, yaitu: (Tanjung, 2017)

1. Penguatan permodalan, dilakukan melalui pemberian modal secara bergulir dari pihak pemerintah.
2. Penguatan kelembagaan, dilakukan melalui komitmen dari pihak lembaga eksekutif dan legislative untuk merevitalisasi UKM.

3. Penguatan kapasitas usaha, dilakukan melalui menyediakan pelatihan-pelatihan.
4. Penguatan aspek pemasaran, dilakukan melalui melakukan kerja sama, pembentukan sentra usaha, dan memfasilitasi promosi usaha.

2.2.4 Kendala Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) seiring berjalan perkembangan tentunya tidak terlepas dari kendala atau masalah-masalah. Namun selain itu juga terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) antara lain: (Partomo dan Rachman, 2002)

1. Mudahnya berinovasi dalam pengembangan produk.
2. Terjalannya keakraban dalam hubungan kemanusiaan
3. Cepatnya penyesuaian dan fleksibilitas pada kondisi pasar yang berubah.
4. Adanya peranan kewirausahaan dan dinamisme manajerial.

Berikut kelemahan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah: (Tambunan, 2002)

1. Kesulitan dalam Pemasaran

Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2. Keterbatasan Finansial

UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.

4. Masalah bahan baku

Selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

5. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual.

Menurut Kurniawan (2009), masalah dasar yang dihadapi Usaha Kecil Menengah adalah:

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.

2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
4. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Menurut Hafsah (2004), masalah utama Usaha Kecil Menengah adanya faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Minimnya Modal

Modal merupakan faktor utama yang sangat diperlukan dalam pengembangan suatu unit usaha. Apabila minimnya modal maka suatu usaha tidak dapat mengembangkan usahanya, sehingga sangat dibutuhkannya penambahan modal dalam usaha.

- b. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan juga sebagai usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun. Minimnya sumber daya manusia pada usaha kecil baik itu dari

aspek pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat mempengaruhi manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal dan juga adanya hambatan dalam beradaptasi pada teknologi baru yang mengalami perkembangan agar dapat meningkatkan daya saing produk.

c. Kurangnya Jaringan Usaha dan Keahlian Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan dalam keahlian penetrasi pasar juga rendah, oleh karenanya produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda halnya dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang memadai.

2. Faktor Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Pada hakikatnya kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun terus dilakukan proses perbaikan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), namun juga belum dirasakan sepenuhnya secara kondusif.

b. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Usaha

Informasi mengenai inovasi dan teknologi yang terbatas sehingga mengakibatkan prasarana dan sarana yang dimiliki yang tidak cepat mengalami perkembangan dan kurangnya kemajuan yang mendukung pada usaha yang dilakukan.

c. Adanya Implikasi Otonomi Daerah

Mengenai pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, bahwa kewenangan daerah mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus masyarakat. Adanya perubahan dari sistem atau kebijakan maka akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah. Apabila keadaan tersebut tidak segera diatasi dapat menyebabkan penurunan daya saing Usaha Kecil Menengah.

d. Adanya Implikasi Perdagangan Bebas

Pemberlakuan AFTA pada tahun 2003 dan APEC pada tahun 2020 sehingga dapat terjadinya implikasi pada Usaha Kecil Menengah dalam melakukan persaingan perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Maka Usaha Kecil Menengah dituntut harus melaksanakan operasi produksi yang produktif dan efisien dan juga harus memperoleh produk sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas yang berlaku diantaranya isu kualitas, isu Hak Asasi Manusia, dan isu lingkungan. Pemberlakuan isu ini yang menjadi hambatan bagi Usaha Kecil Menengah karena negara maju sering digunakan secara tidak baik (*non tariff barrier for trade*), sehingga Usaha Kecil Menengah diharapkan agar selalu mempersiapkan

segala cara atau kekuatan dalam menghadapi persaingan agar mampu bersaing secara unggul baik kompetitif maupun komparatif.

e. Adanya sifat Produk dengan *Lifetime* Pendek

Sebagian besar produk dari industri kecil mempunyai khas atau karakteristik sebagai produk-produk yang unik seperti fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

f. Keterbatasan Akses Pasar

Akses pasar yang terbatas dapat mengakibatkan produk yang telah diproduksi tidak dapat di distribusikan ke pasar nasional ataupun internasional.

2.2.5 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yaitu upaya dalam membangun UKM dengan cara mendorong, memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran pada tingkat potensi yang dimiliki oleh UKM dan berupaya melakukan pengembangan (Afriyani, 2017). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu pada usaha ekonomi produktif maupun konsumtif agar adanya pengembangan kemampuan dan kemandirian sehingga memiliki kekuatan pada penguatan kepemilikan, faktor produksi, pemasaran, distribusi, pemasaran, perolehan upah/gaji, pengetahuan dan keterampilan yang dilaksanakan secara segala aspek baik dari aspek regulasi ataupun

aspek kebijakannya. Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah (UKM) merupakan suatu keharusan karena UKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia yang kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor ekonomi. Maka pembangunan UKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional karena berbasis pada sumber daya ekonomi lokal sehingga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, tidak bergantung pada impor dan hasilnya mampu diekspor. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional.

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga diharapkan adanya peningkatan stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor sehingga dapat membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UKM akan membantu upaya meningkatkan pendapatan per kapita dan sekaligus dapat meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan, serta akan menggerakkan sektor riil. Maka pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat diperlukan agar menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Latumaerissa, 2015). Berikut beberapa peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pembangunan nasional di Indonesia antara lain (Suparyanto, 2016):

1. Menyerap Tenaga Kerja

Pada saat kesempatan kerja yang dirasakan semakin terbatas dibuktikan dengan tingginya angka pengangguran, maka Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mampu berperan aktif dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan tingkat pengangguran. Seperti usaha kerajinan yang banyak menyerap tenaga kerja, usaha kerajinan ini banyak tersebar di Indonesia. Selain usaha kerajinan juga terdapat usaha lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja, yaitu usaha rumahan, usaha kuliner, jasa transportasi, pasar tradisional dan lainnya.

2. Penyedia Barang dan Jasa Bagi Masyarakat

Keberadaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh UKM seperti makanan, minuman, peralatan rumah tangga, perabot dapur, berbagai jasa, dan lainnya sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat sebagai Sebagian alat pemuas keinginan dan kebutuhan masyarakat.

3. Mengurangi Urbanisasi

4. Mendayagunakan Sumber Ekonomi Daerah

5. Menunjukkan Citra Diri Bangsa Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu pada usaha ekonomi produktif sehingga adanya pengembangan kemampuan dan kemandirian agar memiliki kekuatan pada segi penguatan kepemilikan, faktor-faktor produksi, distribusi, pemasaran,

perolehan upah/gaji, pengetahuan dan keterampilan yang dilaksanakan secara berbagai aspek baik itu dari aspek regulasi maupun aspek kebijakan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 diatur mengenai Asas Pemberdayaan dan Pengembangan UKM yang berasas:

1. Kekeluargaan
2. Demokrasi Ekonomi
3. Kebersamaan
4. Efisiensi Berkeadilan
5. Berkelanjutan
6. Berwawasan Lingkungan
7. Kemandirian
8. Keseimbangan Kemajuan
9. Kesatuan Ekonomi Nasional.

Prinsip pemberdayaan UKM yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UKM
4. Peningkatan daya saing UKM

5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Berikut bentuk pemberdayaan UKM agar dapat berjalan maksimal dengan mengadakan: (Supadie, 2013)

1. Program Kemitraan, yaitu suatu bentuk kerjasama yang disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang merupakan landasan pengembangan usaha. Keberhasilan kemitraan sangat bergantung pada dukungan semua pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak perusahaan swasta.
2. Program Pembinaan atau pendampingan, yaitu suatu usaha yang dilakukan secara terencana dan sadar, terarah dan teratur dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang disertai dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, pengawasan, dan stimulasi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pola pembinaan UKM yang dilakukan meliputi beberapa aspek, yaitu aspek SDM, permodalan, teknologi, pasar, memberikan pelatihan dan informasi pasar.
3. Program Pembiayaan, berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 mengenai UKM pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan pembiayaan yaitu penyediaan dana oleh pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan atau lembaga lain guna memperkuat permodalan UKM.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meningkatkan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam memperoleh kemampuan atau keterampilan agar dapat menjadi lebih baik atau adanya proses dalam menaikkan derajat taraf dan meningkatkan produksi. Menurut Sumodiningrat (2011), perekonomian berasal dari dua kata yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* artinya rumah tangga dan *nomos* artinya mengatur, jadi perekonomian adalah suatu aturan, tindakan atau cara mengenai pengelolaan ekonomi kehidupan rumah tangga yang bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup. Perekonomian masyarakat merupakan suatu usaha atau cara yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengelola perekonomian rumah tangga dari yang lemah dapat menjadi lebih baik dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga dapat memperoleh kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Saputro (2016), kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan perekonomian, kesejahteraan kesehatan dan kesejahteraan pendidikan. Masyarakat mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran, kemudian juga mampu memperoleh pendapatan sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian. Selain itu, masyarakat mampu menjadikan pemerataan perekonomian dari warga masyarakat yang berada di sekitarnya dan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah bukanlah penelitian yang baru, namun banyak penelitian terdahulu yang juga melakukan penelitian, membahas, dan menganalisis tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian terkait dengan judul ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Susana dkk (2020) dengan judul “Penerapan Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis MPE merekomendasikan strategi kebijakan UKM dalam pemilihan strategi pemberdayaan UKM berdasarkan pertimbangan dari beberapa atribut, orientasi kewirausahaan, inovasi produk pemanfaatan *e-commerce*, dan orientasi pasar. Sedangkan hasil analisis korespondensi adanya ciri-ciri khusus pada setiap pilihan, khususnya pada pilihan pengembangan pemasaran dengan ciri-ciri pertimbangan yaitu berani mengambil resiko, inovasi layanan, akses internet, kemudahan informasi, dan orientasi pesaing.

Penelitian yang dilakukan oleh Fibriyanti dkk (2020) dengan judul “Pengembangan UMKM Kerajinan Anyaman Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan pengembangan UMKM kerajinan anyaman, yaitu:

1. Adanya peningkatan ketrampilan pengrajin anyaman dalam menghasilkan produk anyaman bambu dan anyaman tikar,
2. Adanya peningkatan daya saing pada produksi kerajinan anyaman,
3. Perekonomian masyarakat mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dkk (2019) dengan judul “Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien regresi dari empat variabel X yaitu pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha dan kemitraan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Wara Kota Palopo.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2019) dengan judul “Strategi Pemberdayaan UKM Klaster Rotan melalui Program PROSPECT (Studi Kasus pada UKM Rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PROSPECT berkonsentrasi pada sistem kerja yang meliputi keselamatan di tempat kerja, kesehatan dan kebersihan dalam bekerja, serta tempat kerja yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Atmaja (2019) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Produksi

Kerajinan Eceng Gondok dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di UKM Karang Pilang Bersatu Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diberikan arahan-arahan atau bimbingan, pendampingan dilakukan dua hari sekali oleh pengelola meliputi pemberian alat, bahan baku, praktek secara langsung, dan pemasaran hasil kerajinan eceng gondok menggunakan strategi promosi melalui pameran, mou, dan sesama paguyuban UKM bertaraf nasional maupun internasional dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Fani Balgis (2019) dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya dalam beberapa aspek pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi Kecil Menengah Kota Pekanbaru telah dilakukan namun masih kurang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Andiny dan Nurjannah (2018) dengan judul “Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Penanggulangan di Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan UMKM mampu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurullah dkk (2017) dengan judul “Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Usaha bersama Motekar Pengrajin Anyaman Bilik”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi membawa perubahan yang berdampak positif melalui berbagai kegiatan-kegiatan pada proses produksi dan pemasaran, serta upaya-upaya untuk meningkatkan usaha dengan pengadaan pelatihan, pembinaan pendampingan dan jaringan usaha. Serta hasil yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprpto dkk (2016) dengan judul “Pemberdayaan UKM Kerajinan Seni Ukir Batu Padas Dusun Silakarang Bali”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengrajin telah melakukan peningkatan jumlah produksi senilai 80%, terjadinya peningkatan pendapatan mencapai 70%, telah mampu melakukan pengupload-an gambar produk ke website dan melakukan transaksi online, serta telah mampu menyusun laporan keuangan sederhana setiap per bulannya untuk mengetahui jumlah pendapatan dan keuntungan yang telah dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Telagawathi dkk (2016) dengan judul “Pemberdayaan Industri Kecil Kerajinan Tangan melalui Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Gianyar Bali”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran dari lembaga menengah swasta yang bernama Mitra Bali yang mendukung atau memfasilitasi pemberdayaan industri kerajinan tangan berdasarkan semangat kewirausahaan, pengembangan

desain-desain baru yang ditawarkan oleh pengrajin kepada pihak Mitra Bali untuk dipasarkan kepada konsumen, dan juga memberikan bantuan berupa dana untuk pembangunan tempat usaha dan ajang-ajang promosi kerajinan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terkait, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Usaha kecil menengah kerajinan rotan merupakan usaha yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Lhoknga. Usaha ini sangat membantu pihak masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti dapat membantu menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhannya, meningkatkan taraf hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, peran pihak pemerintah atau pemerintah daerah sangat diperlukan untuk ikut serta dalam mendukung dan melakukan pemberdayaan agar usaha kecil menengah kerajinan rotan mendapatkan perlindungan, pemberian modal dan pelatihan bagi masyarakat sehingga menjadi penggerak sumber ekonomi yang kuat dan maju.

Maksud penelitian ini untuk menganalisa bagaimana bentuk pemberdayaannya yaitu: Program Kemitraan, yaitu suatu bentuk kerjasama yang disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang merupakan landasan pengembangan usaha; Program pembinaan atau pendampingan UKM yang dilakukan meliputi beberapa aspek, yaitu aspek SDM, permodalan, teknologi, dan pasar; Program pembiayaan yaitu penyediaan dana oleh pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan atau lembaga lain guna memperkuat permodalan UKM dan mengetahui dampak dari pelaksanaan bentuk pemberdayaan yang telah dilaksanakan bagi pengrajin atau pelaku usaha yaitu: menjadikan masyarakat yang

mandiri, terjalinnya kemitraan yang baik dan menciptakan adanya wirausaha-wirausaha yang baru.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. Penelitian ini informasi yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif. Informasi berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Lamgaboh, Gampong Lamcok, Gampong Tanjong, dan Gampong Kueh. Karena gampong tersebut merupakan gampong yang banyak terdapat Usaha Kerajinan Rotan.

3.3 Informan

Subjek penelitian pada jenis penelitian kualitatif dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperoleh informasi yang dikumpulkan sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan

penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). Informan pada penelitian ini diambil dengan teknik *Non-Probability Samplig* menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditetapkan secara sengaja (Bahri, 2018). Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang, berikut rinciannya:

Tabel 3.2
Subjek Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Pelaku Usaha Kerajinan Rotan	7 Orang	Informan
2.	Geuchik Gampong Lamgaboh	1 Orang	Informan
3.	Geuchik Gampong Lamcok	1 Orang	Informan
4.	Geuchik Gampong Tanjong	1 Orang	Informan
5.	Geuchik Gampong Kueh	1 Orang	Informan
6.	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Besar	1 Orang	Informan
Total		12 Orang	Informan

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Aceh, website Badan Pusat Statistik Aceh, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Kabupaten Aceh Besar, website

Badan Pusat Statistik Aceh Besar, website Kemenkeu dan pemerintahan 4 (empat) Gampong (Gampong Kueh, Gampong Lamcok, Gampong Lamgaboh dan Gampong Tanjong).

3.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

1. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah kerajinan rotan, aparatur desa dan pihak Disperindag/PLUT Kabupaten Aceh Besar.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengolah, memilih, menyimpan informasi pada bidang pengetahuan tertentu, memberikan atau mengumpulkan beberapa bukti berdasarkan keterangan seperti gambar, bahan referensi, kutipan dan lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data penelitian ini menggunakan *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagaian, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisi data model Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah seluas 87,95 KM² (8.795 Ha) yang menjadi ibukota kecamatan yaitu Moen Ikuen. Kecamatan Lhoknga terdapat 28 Gampong (Desa) dengan jumlah kependudukan 17.391 jiwa. Gambaran mengenai garis batas wilayah Kecamatan Lhoknga yaitu di sebelah Utara dibatasi oleh Kecamatan Peukan Bada, di sebelah Selatan dibatasi oleh Kecamatan Leupung, di sebelah Barat dibatasi oleh Samudra Indonesia, dan sebelah Timur dibatasi oleh Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal dan Kecamatan Simpang Tiga. Sumber mata pencaharian masyarakat Lhoknga sebagian besar sebagai petani, pekebun, peternak, pedagang, penjahit, wirausaha, pertukangan, buruh, PNS, pelaku usaha atau pengrajin kerajinan rotan, dan lainnya.

Jumlah kemukiman Kecamatan Lhoknga terdapat 4 (empat) mukim, yaitu Mukim Lhoknga dengan 31,30 Km², Mukim Kueh dengan luas 33,52 Km², Mukim Lam Lhom dengan luas 12,04 Km², dan Mukim Lampuuk dengan luas 11,08 Km². Lokasi pada penelitian ini hanya berfokus pada Mukim Kueh di 4 (empat) Gampong, yaitu Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, Gampong Tanjong, dan Gampong Lamcok. Pada 4 (empat) Gampong ini

banyak terdapat pengrajin/pelaku usaha penghasil olahan rotan. Berdasarkan data yang telah terdata dari Dinas UMKM dan PLUT Aceh Besar Tahun 2021, jumlah penjual produk rotan sebanyak 29 orang, jumlah pengrajin yang bekerja di rumah sebanyak 104 orang, dan pengumpul rotan sebanyak 6 orang.

4.1.1 Gambaran Umum Gampong Lamgaboh

Gampong Lamgaboh merupakan wilayah kemukiman Kueh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar seluas 103 Ha. Gambaran mengenai garis batas wilayah Gampong Lamgaboh yaitu di sebelah Barat batasan dengan Gampong Lampaya, di sebelah Timur batasan dengan Gampong Kueh, di sebelah Utara batasan dengan Gampong Lamcok, dan di sebelah Selatan batasan dengan Gampong Aneuk Paya. Secara umum sumber mata pencaharian Gampong Lamgaboh yaitu sebagai petani, peternak, sebagian lainnya sebagai pedagang, wirausaha, PNS, buruh, pertukangan, penjahit dan lainnya.

Gampong Lamgaboh terdapat 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Beringin, Dusun Geulumpang, dan Dusun Manggis. Berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 jumlah penduduk Gampong Lamgaboh sebanyak 729 Jiwa dengan jumlah 243 KK yang laki-laki berjumlah 313 jiwa dan perempuan berjumlah 416 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Lamgaboh Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Beringin	68	100	136
Geulumpang	72	112	154
Manggis	72	101	126
Jumlah	243	313	416

Sumber: Profil Gampong Lamgaboh, 2021

4.1.2 Gambaran Umum Gampong Tanjong

Gampong Tanjong merupakan wilayah yang terletak di kemukiman Kueh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar seluas 135 Ha. Gambaran mengenai garis batas wilayah Gampong Tanjong yaitu di sebelah Utara batasan dengan Gampong Seibun Keutapang dan Gampong Seibun Ayon, di sebelah Selatan batasan dengan Gampong Lamcok, di sebelah Timur batasan dengan Gampong Nusa, di sebelah Barat batasan dengan persawahan Gampong Lamlhom dan Gampong Lamgaboh. Secara umum sumber mata pencaharian Gampong Tanjong yaitu petani, pekebun, nelayan, peternak, pedagang, tukang, buruh, penjahit, PNS/POLRI/TNI, sopir, dan lainnya. Gampong Tanjong terbagi atas 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun Blang-Goh, Dusun Lam-U, dan Dusun Ateuk Padang. Berdasarkan data terakhir hasil sensus 2020 jumlah penduduk Gampong Tanjong sebanyak 716 Jiwa dengan

jumlah 208 KK yang laki-laki berjumlah 367 jiwa dan perempuan berjumlah 349 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Gampong Tanjong Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Ateuk Padang	73	125	124
Lam U	81	128	125
Blang Goh	54	114	100
Jumlah	208	367	349

Sumber: Profil Gampong Tanjong, 2021

4.1.3 Gambaran Umum Gampong Kueh

Gampong Kueh merupakan wilayah yang terdapat di kemukiman Kueh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar seluas 67 Ha. Gambaran mengenai garis batas wilayah Gampong Kueh yaitu di sebelah Utara batasan dengan Gampong Lamcok, di sebelah Timur batasan dengan Gampong Nusa dan Gampong Lam Ateuk, di sebelah Barat batasan dengan Gampong Lamcok dan Gampong Lamgaboh, dan di sebelah Selatan batasan dengan Gampong Lam Ateuk. Secara umum sumber mata pencaharian Gampong sebagai pedagang, petani, pekebun, peternak, nelayan, TNI/POLRI/PNS, karyawan, buruh, tukang, dan lainnya. Gampong Kueh terbagi menjadi 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Bineh Blang, Dusun Tengoh, Dusun Lamneuheun, dan dusun Baroh. Berdasarkan data terakhir hasil sensus 2020 jumlah penduduk

Gampong Kueh sejumlah 494 jiwa dengan jumlah 150 KK yang laki-laki berjumlah 238 jiwa dan perempuan berjumlah 256 jiwa.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Gampong Kueh Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Bineh Blang	25	54	40
Tengoh	28	36	50
Lamneuheun	57	78	88
Baroh	40	70	78
Jumlah	150	238	256

Sumber: Profil Gampong Kueh, 2021

4.1.4 Gambaran Umum Gampong Lamcok

Gampong Lamcok merupakan wilayah yang terdapat pada kemukiman Kueh di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar seluas 36 Ha. Gambaran mengenai garis batas wilayah Gampong Lamcok yaitu di sebelah Utara batasan dengan Gampong Tanjong, di sebelah Timur batasan dengan Gampong Nusa dan Gampong Kueh, di sebelah Barat batasan dengan Gampong Lamgaboh dan Mukim Lamhom, dan di sebelah Selatan batasan dengan Gampong Lamgaboh. Secara umum sumber mata pencaharian Gampong sebagai pedagang, petani, pekebun, peternak, nelayan, TNI/POLRI/PNS, Guru, buruh, tukang, dan lainnya. Gampong Kueh terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun Blang Silhok, Dusun Glee Naleung, dan Dusun Mon Jepang. Berdasarkan data

terakhir hasil sensus 2020 jumlah penduduk Gampong Kueh sejumlah 406 jiwa dengan jumlah 119 KK yang laki-laki berjumlah 200 jiwa dan perempuan berjumlah 206 jiwa.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Gampong Lamcok Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Blang Silhok	45	73	73
Glee Naleung	31	57	58
Mon Jepang	43	70	75
Jumlah	119	200	206

Sumber: Profil Gampong Lamcok, 2021

4.2 Bentuk Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yaitu upaya dalam membangun UKM dengan cara mendorong, memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran pada tingkat potensi yang dimiliki oleh UKM dan berupaya melakukan pengembangan (Afriyani, 2017). Upaya pemberdayaan UKM dapat dilakukan dengan bentuk sasaran pola agar untuk menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat terjadinya peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. Upaya ini dapat dilaksanakan pada segala jenis usaha

seperti usaha kuliner, usaha fashion, usaha otomotif, usaha agribisnis dan usaha produk kreatif atau kerajinan. Salah satu usaha yang potensinya sangat besar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Lhoknga yaitu usaha kerajinan rotan. Usaha kerajinan rotan yang telah dijalankan oleh masyarakat atau pengrajin dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan sehingga usaha ini dapat dilakukan suatu upaya pemberdayaan oleh pihak-pihak terkait bagi masyarakat atau pengrajin agar mendapatkan perhatian lebih baik dari segi dunia usaha, motivasi kerja, keterampilan atau pengetahuan mengenai Usaha Kecil Menengah kerajinan rotan.

Usaha kerajinan rotan merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh sebagian masyarakat di empat desa (Gampong Lamgabo, Gampong Kueh, Gampong Tanjong, dan Gampong Lamcok) Kecamatan Lhoknga. Usaha kerajinan rotan ini telah berjalan sejak Tahun 1990an hingga saat ini. Usaha kerajinan rotan telah dijalankan oleh pengrajin/pelaku usaha berkisar 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, bahkan telah dijalankan semenjak anaknya masuk sekolah SD sampai kuliah. Usaha kerajinan rotan ini merupakan usaha kerajinan yang diwarisi secara turun-temurun sehingga setiap masyarakat telah memiliki kemampuan menganyam rotan. Sekitar 80% penduduk dari 4 (empat) desa yang diteliti berprofesi sebagai pengrajin rotan dan pedagang rotan.

Hasil olahan dari kerajinan rotan terdiri dari beberapa produk yaitu berupa tas, koper, tempat bola lampu listrik, tudung saji, tempat kue, tempat ikan, keranjang parcel, vas bunga, tempat cucian, kursi, meja, keranjang buah, keranjang baju, kap lampu, dan berbagai alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahan baku rotan yang digunakan berasal dari Lhoknga, Leupung, Ligan, Krueng Raya, Lamteuba, Seulimum, Bireun dan juga terdapat dari luar daerah seperti Medan, Cirebon, Kalimantan. Ada 4 (empat) jenis bahan baku rotan, yaitu rotan petrit, rotan slimit, rotan mano dan rotan seukeum. Rotan memiliki kualitas yang sangat bagus seperti mudah dibentuk, ringan, awet, kuat, dan elastis. Harga masing-masing rotan bervariasi, seperti rotan petrit dengan harga Rp50.000/kg yang berasal dari Medan, Cirebon, dan Kalimantan, rotan slimit dengan harga Rp15.000/kg yang berasal dari Leupung, Lamteuba, Seulimum, dan rotan seukeum dengan harga Rp8.000/kg yang berasal dari Lhoknga, Ligan, Krueng Raya.

Pemberdayaan usaha kerajinan rotan ditujukan kepada para pengrajin atau pedagang rotan agar termotivasi, berdaya, adanya kesempatan, mampu bekerjasama, melihat dan memanfaatkan peluang, berani mengambil risiko, mampu mengambil keputusan dan mampu bertindak sesuai inisiatif yang dimiliki. Pelaksanaan pemberdayaan usaha kerajinan rotan bukan hanya semata-mata tanggung jawab pihak pemerintah melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat atau para pengrajin dan pedagang rotan.

Pemberdayaan usaha kerajinan rotan dilakukan dengan memberikan motivasi atau dorongan, pendampingan atau bimbingan, penyediaan prasarana, pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki pengrajin atau pedagang rotan agar mampu menjadi mandiri. Pemberdayaan usaha kerajinan rotan yang dilakukan adanya *feedback* antara pihak pemerintah dan para pengrajin atau pedagang rotan. Usaha kerajinan rotan telah mampu mendongkrak perekonomian para pengrajin atau pedagang rotan di 4 (empat) desa tersebut. Oleh karena itu pihak pemerintah daerah atau perusahaan swasta ikut terlibat dalam melakukan suatu proses agar usaha rotan lebih berdaya atau kuat dan para pengrajin atau pedagang rotan dapat mandiri melalui program pemberdayaan.

Pihak pemerintah baik itu pemerintah daerah ataupun perusahaan swasta memberikan suatu bentuk pemberdayaan agar para pengrajin rotan atau pedagang rotan dapat mampu mengatasi permasalahan segala aspek dunia usaha, inovasi baru, pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, semangat kerja, sikap, modal usaha, dan aspek lainnya. Adapun yang menjadi indikator dari bentuk-bentuk pemberdayaan Usaha Kecil Menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian pada 4 (empat) Desa/Gampong di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yaitu program kemitraan, program pembinaan/pendampingan, dan program pembiayaan.

1. Program Kemitraan

Program kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan secara satu pihak dan pihak lain yang disertai adanya pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling melengkapi, saling memahami, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. Keberhasilan program kemitraan ini sangat bergantung pada pengayoman pihak tertentu baik dari pihak swasta ataupun pemerintah. Maksudnya suatu bentuk kerjasama antara pengrajin dengan pemerintahan desa atau pihak terkait, pemerintahan dengan pihak terkait lainnya, dan pengrajin dengan pengrajin lainnya. Pihak tersebut sangat mendukung usaha yang telah dilaksanakan oleh pengrajin. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan dengan memberikan apresiasi, kelengkapan administrasi, pengembangan dan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada empat desa (Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, Gampong Tanjong, dan Gampong Lamcok) oleh penulis hanya satu desa yang mendapat pengembangan atau adanya hubungan kemitraan antara pemerintahan desa dengan para pengrajin atau pelaku usaha yaitu Gampong Tanjong, dimana hubungan bentuk kerja sama antara pengrajin dengan pihak pemerintahan desa sangat baik. Pengrajin terpenuhi apa yang diinginkan atau didapatkan sedangkan pihak pemerintahan desa dapat terjalannya visi misi yang ingin dicapai. Pihak pemerintahan desa menjadikan usaha rotan sebagai badan usaha BUMG agar para pengrajin dapat terbantu dari segi

memasarkan atau tersedianya bahan baku. Pihak pemerintahan desa menyediakan bahan baku untuk membantu pengrajin agar tidak kesulitan dalam mencari bahan baku dan menyediakan tempat untuk memasok atau memasarkan produk yang telah dihasilkan oleh pengrajin, serta dapat juga menambah pendapatan desa dan menjadi salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh desa.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli S.T selaku kepala desa (Geuchik) di Gampong Tanjong mengatakan: *“Hubungan kemitraan antara pemerintahan desa dengan pengrajin atau pedagang rotan sangat baik. Kami sangat mendukung usaha kerajinan rotan, usaha ini sangat berpotensi. Salah satu bentuk apresiasi kami kepada para pengrajin, kami menjadikan usaha rotan ini sebagai salah satu Badan Usaha Milik Gampong yang bernama BUMG Adee Makmu. Kami melihat para pengrajin harus mencari sendiri bahan baku dan mencari sendiri penjual untuk dibeli hasil produk rotan yang telah dihasilkan. Maka kami berinisiatif untuk menyediakan tempat atau toko sebagai tempat pemasaran produk rotan dan menyediakan bahan baku agar para pengrajin tidak sulit mencari bahan baku rotan”*.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Yanti selaku salah satu pengrajin yang menjaga toko di BUMG Adee Makmu Gampong Tanjong, mengatakan: *“Sekarang usaha rotan ini telah di bawah naungan BUMG walaupun baru berjalan pada tahun 2020, kami para pengrajin sangat terbantu setelah menjadi badan usaha milik gampong. Kami sudah ada tempat untuk memperjualkan produk*

yang kami hasilkan. Biasanya kami setelah membuat produk rotan seperti tudung saji, kami harus mencari orang atau penjual untuk menjual produk rotan. Setelah usaha rotan ini di bawah naungan BUMG, kami dapat memasok atau memasarkan produk kami di tempat atau toko yang telah disediakan oleh pihak pemerintahan desa, jadi kami tidak repot lagi mencari penjual untuk kami jual produk rotan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa dengan adanya BUMG Adee Makmu secara tidak langsung dapat membantu para pengrajin dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran produk, biasanya para pengrajin harus mencari sendiri bahan baku untuk membuat rotan dan mencari sendiri pembeli hasil produk rotan untuk dipasarkan, namun dengan dijadikannya usaha rotan di bawah naungan BUMG sangat membantu dan memudahkan para pengrajin dalam memasok dan memasarkan produk rotan sehingga para pengrajin tidak mengalami kesulitan pada perolehan bahan baku dan pemasaran produk.

Adapun tiga desa lainnya (Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, dan Gampong Lamcok) pihak pemerintahan desa tidak ikut berkontribusi dalam bentuk kerja sama mengenai usaha kerajinan rotan namun pihak pemerintah desa sangat mendukung usaha kerajinan rotan ini dari segi administrasi, apabila adanya pengurusan berkas pengajuan proposal dari pihak pengrajin/pelaku usaha pihak pemerintah desa dengan sukarela membantu dan mengeluarkan surat/berkas yang diperlukan seperti pengurusan

berkas bantuan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) dari Dinas UMKM dan juga keperluan lainnya.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ruslaidi selaku kepala desa (Geuchik) Gampong Kueh mengatakan: *“Hubungan pihak pemerintahan desa dengan para pengrajin atau pelaku usaha baik. Kami sangat mendukung usaha kerajinan rotan ini, salah satu bentuk dukungan kami dari segi administrasi”*. Hal serupa juga dipaparka oleh Bapak Juhaimi selaku Plt.Geuchik Gampong Lamgaboh mengatakan: *Kami sangat mendukung usaha kerajinan rotan ini dengan memberikan akses dari segi administrasi”*.

Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Edi Sudrajat, SE selaku Sekretaris Gampong Lamcok) mengatakan: *“Hubungan antara pengrajin dengan pemerintahan desa sangat baik. Kami sangat mendukung usaha kerajinan rotan ini, salah satu bentuk dukungan kami dari segi administrasi”*. Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Cut selaku pengrajin atau pelaku usaha rotan mengatakan: *“Pihak pemerintahan desa mendukung usaha rotan ini, misalnya kami mengurus proposal permohonan usaha rotan pihak pemerintahan desa membantu untuk melengkapi administrasi yang kami butuhkan”*.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa pihak pemerintahan desa sangat mendukung usaha kerajinan rotan, salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak pemerintahan desa yaitu memberikan kebebasan akses administrasi

seperti berkas atau surat-menyurat yang diperlukan untuk pengajuan atau permohonan bantuan dari pihak terkait lainnya.

Selain dari pihak pemerintahan desa tiga desa ini (Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, dan Gampong Lamcok) telah bermitra dengan lembaga atau pihak terkait seperti Disperindag atau PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Aceh Besar dengan para pengrajin atau pelaku usaha seperti yang dipaparkan oleh Bapak T. Fiza selaku divisi pemasaran mengatakan: *“Kami semua bermitra dengan pengrajin atau pelaku usaha rotan, hubungan kemitraan kami sangat baik. Kami ada datang langsung atau survei ke lapangan maksimal 2 bulan sekali untuk menanyakan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin atau pelaku usaha. Jika kami tidak datang ke lapangan ada juga pengrajin atau pelaku usaha yang datang ke kantor untuk mengatakan apa yang dialami. Misalnya pengrajin perlu tambahan modal untuk usahanya, maka kami memberikan solusi untuk meminjami dana pada perbankan, koperasi, dan lainnya”*.

Ibu Ferdianti selaku pengrajin atau pelaku usaha rotan juga mengatakan bahwa: *“Saya bermitra dengan pihak Disperindag atau PLUT Aceh Besar, jika saya mengalami kendala atau ada masalah pada usaha rotan saya pergi ke kantor PLUT Aceh Besar untuk mengadu keluh-kesah atau istilahnya induk kami para pengrajin atau pelaku usaha rotan. Jika saya ke kantor pihak PLUT menerima kedatangan saya dan mendengar keluh kesah yang saya alami dan memberikan solusinya”*.

Hal serupa juga dipaparkan Ibu Irawati selaku pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan mengatakan: *“Pihak Disperindag atau PLUT ada datang ke kedee/toko saya, menanyakan mengenai bagaimana usaha saya, apa saja kendala yang saya alami, dan memberikan solusi setiap permasalahan yang saya alami”*.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa hubungan kemitraan antara pengrajin atau pelaku usaha dengan pihak terkait yaitu Disperindag atau PLUT Aceh Besar sangat baik. Pihak Disperindag atau PLUT sangat membantu para pengrajin seperti bersedia menerima apa saja kendala-kendala yang dialami dan memberikan apa saja solusi-solusi kepada para pengrajin. Misalnya kendala atau masalah yang dialami oleh para pengrajin pada perolehan modal, keterbatasan perlengkapan kede, minimnya pembeli, dan lainnya. Apabila pada perolehan modal pihak PLUT memberikan solusi agar meminjami dana pada lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi, simpan pinjam. Salah bentuk kemitraan yaitu pihak PLUT Aceh Besar melakukan survey atau mendatangi para pengrajin untuk mengetahui berbagai masalah atau keuntungan yang diperoleh oleh pengrajin atau pelaku usaha. Kemudian memberikan solusi atau pembinaan dan pengembangan kepada para pengrajin. Pihak PLUT juga menerima kedatangan para pengrajin rotan untuk mengadu apa yang telah dialami selama menjalankan usaha rotan.

Hubungan kemitraan bukan hanya dijalankan oleh pihak pemerintah atau pihak terkait saja, namun antara pengrajin atau

pelaku usaha dengan pelaku usaha juga adanya hubungan kemitraan yang saling melengkapi dan saling menguntungkan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Aminah selaku pengrajin atau pelaku usaha mengatakan : *“Jika saya mendapat orderan produk rotan yang banyak dan tidak sanggup menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan seperti orderan tudung saji dari pelanggan dengan waktu 1 Minggu 50 buah tudung saji, maka saya meminta bantuan dari pengrajin lain dengan memberikan bahan baku kemudian upahnya sesuai yang disepakati dengan bantuan tersebut saya dapat memenuhi orderan dari pelanggan tepat waktu”*.

Maksudnya apabila Ibu Aminah tidak menyanggupi orderan dari pelanggan dengan jumlah yang banyak pada waktu yang ditentukan sangat singkat maka Ibu Aminah meminta bantuan berupa jasa kepada pengrajin rotan lain dengan memberikan bahan baku sesuai upah yang telah ditetapkan. Hal tersebut adanya bentuk kemitraan atau hubungan kerjasama yang saling melengkapi dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ibu Aminah dapat memenuhi orderan dari pelanggan dan memperoleh keuntungan serta memperoleh kepercayaan dari pelanggan dengan menyelesaikan orderan tepat waktu, sedangkan pengrajin memperoleh upah atau gaji dari produk yang telah dianyam sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa penambahan pendapatan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan program kemitraan telah dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa, pihak terkait seperti Disperindag atau PLUT Aceh Besar, dan pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan. Pihak pemerintahan desa dan pihak terkait sangat mendukung usaha kerajinan rotan. Hubungan kemitraan antara pelaku usaha/pengrajin dengan pihak pemerintah desa sangat baik, saling melengkapi dan saling menguatkan satu sama lain. Begitu juga hubungan antara pengrajin dengan pelaku usaha yang saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguatkan, seperti pengrajin membutuhkan pelaku usaha untuk memasarkan atau memperjualkan hasil produk yang telah dianyam untuk mendapatkan upah dari hasil buaatannya, sedangkan pelaku usaha memerlukan produk untuk diperjualbelikan agar mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun memerlukan produk dari pengrajin untuk membantu menambah barang di kedanya. Hubungan antara pihak pemerintah Gampong Tanjong dan pengrajin sangat baik adanya timbal balik saling melengkapi, pengrajin mendapatkan atau terbayarkan dari hasil jerih payahnya sedangkan pihak desa menambah pendapatan dan tercapainya tujuan dari misi yang telah dirancang. Produk kerajinan rotan yang dihasilkan oleh pengrajin ditampung dan dipasarkan di toko milik BUMG Gampong Tanjong. Usaha ini telah menjadi salah satu bentuk usaha di BUMG Gampong Tanjong yang bernama BUMG Tanjong Adee

Makmu. Pihak disperindag selalu memantau atau melakukan survei usaha kerajinan rotan untuk melihat kondisi dan situasi pengrajin.

2. Program Pembinaan atau Pendampingan

Program Pembinaan atau pendampingan, yaitu suatu upaya yang dilakukan secara terencana dan sadar, terarah dan teratur sehingga adanya peningkatan pemahaman pengetahuan, tingkah laku atau sikap, kemampuan atau keterampilan yang disertai adanya pengarahan, tindakan, pengembangan, bimbingan, pengawasan dan dorongan agar dapat tercapainya tujuan yang sesuai diinginkan. Pembinaan atau pendampingan pada Usaha Kecil Menengah dapat dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain aspek permodalan, sumber daya manusia, teknologi, pemasaran, mengadakan pelatihan, dan lainnya. Program pembinaan atau pendampingan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak pemerintahan atau pihak-pihak terkait. Program ini dilakukan pada Usaha Kecil Menengah kerajinan rotan atau masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin/pelaku usaha rotan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis pada empat desa (Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, Gampong Tanjong, dan Gampong Lamcok) hanya satu desa yang belum mendapatkan program pembinaan atau pendampingan dari pihak pemerintah atau lembaga-lembaga kepada para pengrajin atau pelaku usaha yaitu Gampong Tanjong. Hal ini sesuai dengan hasil pernyataan oleh kepala desa (Geuchik) Gampong Tanjong

mengatakan: *“para pengrajin atau pelaku usaha belum pernah mendapatkan atau mengikuti program pembinaan atau pendampingan dari pihak manapun, namun setelah usaha kerajinan rotan menjadi BUMG Tanjong Adee Makmu Gampong Tanjong kami telah memperoleh apresiasi dari Pemkab Aceh Besar berupa BUMG terbaik bintang 5 se-Aceh Besar tahun 2021.*

Berbeda halnya dengan tiga desa lain (Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, dan Gampong Lamcok) program pembinaan atau pendampingan berupa pelatihan atau training telah ada dan didapatkan oleh pengrajin atau pelaku usaha yang dilaksanakan oleh pihak terkait atau lembaga-lembaga yaitu seperti pihak Disperindag atau PLUT Aceh Besar. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan pihak PLUT Aceh Besar Bapak T. Fiza selaku divisi Pemasaran mengatakan: *“Kalau program pembinaan atau pendampingan pasti ada seperti pelatihan. Pelatihan diadakan di Hotel Hermes atau aula serbaguna, kegiatan pelatihan itu kami hadirkan seorang pematri mengenai pembahasan yang telah dirancang seperti manajemen usaha, skill, pemasaran, perpajakan, inovasi baru, dan lainnya mengenai dunia usaha. Kegiatan pelatihan ini kadang bukan dari pihak kami yang adakan, tetapi misalnya pihak BI yang salah satu bentuk kolaborasi dengan pihak kami”.*

Ibu Aminah selaku pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan juga mengatakan bahwa: *“Saya sudah ada pembinaan dan sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh*

Disperindag atau PLUT Aceh Besar, Dekranasda, Disnaker, PT. SAI. Saya sudah pernah ikut pelatihan bersama pengrajin lain dibawa oleh pihak pemerintah ke luar Aceh yaitu ke Yogyakarta selama 2 bulan segala kebutuhan saya ditanggung mulai dari konsumsi, transportasi, penginapan, dan diberikan uang saku. Selama disana banyak hal yang saya pelajari pembuatan model baru dari bahan baku rotan saya diajarkan cara membuat tas, tata letak barang, dan ide-ide baru lainnya”.

Ibu Aminah menjelaskan bahwa sudah adanya pembinaan dari pihak pemerintah dan sudah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Disperindag, Dekranasda, Disnaker, Bank Indonesia. Ibu Aminah dan pengrajin di bidang lain juga sudah pernah ikut pelatihan ke luar Aceh yaitu di Yogyakarta yang ditanggung oleh pemerintah seperti biaya transportasi, biaya penginapan, dan juga uang saku.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisa bahwa pihak PLUT Aceh Besar ada melaksanakan program pembinaan atau pendampingan terhadap pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan seorang pemateri atau pembicara yang sesuai dengan tema atau materi yang telah disusun. Materi atau tema yang dibahas seperti manajemen usaha, inovasi baru, keahlian atau ketrampilan, pemasaran, perpajakan, dan lainnya. Kegiatan pelatihan diadakan di ruang tertutup seperti hotel Hermes, aula serbaguna, atau di kantor PLUT yang dihadiri oleh para pengrajin. Pihak PLUT dalam menjalankan

kegiatan pelatihan adanya kolaborasi dari berbagai pihak seperti Disnaker, BI, Dinas Keuangan, Dinas Ketenagakerjaan, LAZADA, dan pihak terkait lainnya.

Ibu Ferdiyanti selaku pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan juga memaparkan bahwa: *"Ada beberapa pihak pemerintah dan pihak terkait yang sudah membina dan membimbing dan ikut pelatihan oleh Disperindag atau PLUT Aceh Besar, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Kantor Perpajakan, BI, BAPPEDA, LAZADA. Kami dibina dan dibimbing mengenai pembukuan, pajak, legalitas izin usaha, pemasaran, model atau inovasi baru"*. Ibu Ferdiyanti menjelaskan bahwa sudah adanya pembinaan atau pendampingan dari pihak pemerintah atau pihak terkait dan telah ikut seriat dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Disperindag atau PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Aceh Besar, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Kantor Perpajakan, BI, BAPPEDA, LAZADA. Kegiatan pelatihan yang telah diadakan oleh pemerintah yaitu mengenai tata cara pembuatan buku laporan keuangan, perpajakan, adanya model atau inovasi baru, legalitas izin usaha, pemasaran melalui media sosial seperti promosi pada Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya.

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Hamnah selaku pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan mengatakan: *"Saya ada ikut pelatihan yang diadakan oleh PLUT, saya ikutnya bersama kelompok sejumlah 10 orang. Pelatihan berlangsung 2 hari biaya transportasi dan diberi uang saku ditanggung diberi*

senilai Rp200.000/hari yang dilaksanakan di Hotel Permata Hati". Ibu Hamnah menjelaskan bahwa sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak PLUT Aceh Besar. Ibu Hamnah mengikuti pelatihan bersama pengrajin lainnya dalam kelompok sejumlah 10 orang. Kegiatan pelatihan berlangsung selama 2 hari dengan ditanggung biaya transportasi dan uang saku senilai Rp200.000/hari. Kegiatan pelatihan dihadiri oleh seorang pemateri yang membahas mengenai pemasaran melalui media sosial dan tata pembukuan laporan keuangan.

Program pembinaan atau pendampingan ada juga yang belum pernah didapatkan atau diikuti oleh para pengrajin atau pelaku usaha yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Nuraini : *"Saya belum pernah mengikuti pembinaan atau pendampingan yang diadakan oleh pihak pemerintah atau pihak terkait lainnya"*. Ibu Nuraini menjelaskan bahwa belum pernah mengikuti program pembinaan atau pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait seperti mengikuti kegiatan pelatihan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan/pendampingan telah dilaksanakan oleh pihak pemerintahan seperti Disperindag atau PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), Dinas Sosial, disnaker, Dekranasda, PT. SAI, Pegadaian dan lainnya. Program ini diikuti oleh sebagian pengrajin/pelaku usaha, ada juga yang belum pernah mendapatkan pembinaan atau pendampingan seperti pelatihan. Kegiatan

pelatihan yang diikuti oleh para pengrajin atau pelaku usaha secara berkelompok yang beranggota 10 orang dengan ditanggung segala biaya seperti tanggungan biaya transportasi, biaya uang saku, dan lainnya. Para pengrajin atau pelaku usaha banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dengan adanya pembinaan atau pendampingan seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah atau pihak terkait yaitu mendapatkan ilmu mengenai manajemen usaha, model produk rotan yang baru, manajemen tempat, pemasaran dengan cara online, cara membuat laporan keuangan. Pembinaan dilaksanakan oleh pihak pemerintah agar para pengrajin/pelaku usaha mendapatkan ilmu tambahan dalam mengelola usaha atau melatih kemampuan untuk mencapai tujuan yang sesuai diinginkan. Selain itu para pengrajin ada juga yang belum pernah mendapatkan atau mengikuti program pembinaan atau pendamping yang dilaksanakan oleh pihak terkait ataupun lembaga-lembaga.

3. Program Pembiayaan

Program Pembiayaan, berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 mengenai UKM pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan pembiayaan yaitu penyediaan dana oleh pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan atau lembaga lain guna memperkuat permodalan UKM. Pembiayaan berupa modal usaha dapat disediakan oleh pemerintah atau pemerintahan desa, pihak-pihak terkait seperti perbankan ataupun bermula pada modal yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat ketika memulai usaha.

Pembiayaan tidak mesti penyediaan berupa dana tetapi juga bisa penyediaan bahan baku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis pada empat desa (Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, Gampong Tanjong, dan Gampong Lamcok) hanya satu desa yang mendapatkan program pembiayaan berupa penyediaan bahan baku yaitu Gampong Tanjong. Hal ini sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Keuchik H. Ramli ST selaku Kepala Desa Gampong Tanjong mengatakan: *“Kami pihak pemerintahan desa menyediakan bantuan berupa bahan baku yang kami beli menggunakan anggaran desa. Anggaran yang kami sediakan berbentuk penyediaan bahan baku itu berupa dana hibah tidak ada pengembalian berupa dana. Usaha kerajinan rotan di bawah naungan BUMG baru berjalan sejak tahun 2020 hingga saat ini, namun dari pihak pemerintah atau pihak terkait belum pernah mendapatkan bantuan modal”*. Pihak pemerintahan desa menyediakan bahan baku untuk pembuatan rotan oleh para pengrajin yang beranggota 30 orang, bahan baku rotan dibeli menggunakan anggaran dana desa. Anggaran tersebut diberikan tanpa adanya pengembalian namun berupa dana hibah.

Adapun pada Gampong Kueh, Gampong Lamcok, dan Gampong Lamgaboh pihak pemerintahan desa belum menyediakan bantuan dari anggaran desa namun para pengrajinnya memulai usaha menggunakan modal sendiri seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ibu Irawati mengatakan: *“Saya memulai usaha pertama kali*

menggunakan modal sendiri, namun pada tahun 2019 saya ada memperoleh bantuan dari pihak Disperindag. Saya memasang atap kede dan rak susun produk rotan, saya kalkulasikan berapa biaya yang saya keluarkan untuk pembuatan rak dan memasang atap, kemuadian saya foto kirim ke pihak Disperindag lalu pihak Disperindag turun ke lapangan jika sesuai maka diberikan biaya ganti dari biaya yang sudah saya keluarkan". Ibu Irawati menjelaskan bahwa memulai usaha pertama kali menggunakan modal sendiri, namun pada tahun 2011 ada mendapatkan bantuan biaya berupa biaya pengganti dari biaya prasarana yang telah dikeluarkan dalam pembuatan rak susun produk rotan dan memasang atap kede atau toko.

Ibu Ferdianti selaku pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan juga memaparkan bahwa: "Saya memulai usaha pertama kali dengan modal sendiri, namun setelah berjalannya usaha saya ada menerima bantuan berupa sarana alat bantu kerja dari Bank Aceh. Kemudian saya juga ada menerima bantuan dari PT. Telkom berupa dana senilai Rp3.000.000 untuk perlengkapan kede. Pada awal bulan Agustus kede saya terjadi kebakaran, pihak pemerintahan desa ada meminta KTP saya untuk di urus bantuan modal. Akhirnya saya mendapatkan modal untuk memuali usaha rotan kembali senilai Rp3.000.000".

Ibu Ferdianti menjelaskan bahwa pertama kali memulai usaha menggunakan modal sendiri, setelah berjalannya usaha mendapatkan penerimaan modal dari Bank Aceh dan PT. Telkom

senilai Rp3.000.000 untuk perlengkapan sarana toko/kede. Pada awal bulan Agustus 2021 usaha Ibu Ferdiyanti mengalami kebakaran yang mengakibatkan semua produk dan kede hangus lenyap dibabat oleh si jago merah. Pihak pemerintahan desa ikut membantu mengurus dana bantuan dari pihak Baitul Maal dengan syarat memberikan KTP untuk pengajuan bantuan. Ibu Ferdiyanti telah memberikan KTP kepada pihak pemerintahan desa untuk pengajuan permohonan bantuan berupa dana. Akhirnya Ibu Ferdiyanti adanya perolehan dana bantuan dari Baitul Maal senilai Rp3.000.000 untuk memulai kembali usaha kerajinan rotan.

Ibu Nuraini juga memaparkan bahwa: *“Usaha rotan ini sudah saya jalankan sejak tahun 2011, ketika memulai pertama kali saya menggunakan modal sendiri hingga saat ini saya belum mendapatkan bantuan modal dari pihak manapun. Kami para pengrajin atau pelaku usaha rotan sangat membutuhkan bantuan modal dari pihak pemerintah agar dapat membantu kami untuk mengembangkan usaha yang kami jalankan”*. Ibu Nuraini menjelaskan bahwa usaha kerajinan rotan yang dijalankan pada tahun 2011 hingga saat ini menggunakan modal awal dari sendiri tanpa memperoleh bantuan modal dari pihak manapun. Ibu Nuraini sangat mengharapkan bantuan berupa modal dari pihak terkait atau lembaga-lembaga keuangan agar dapat memberikan modal untuk mengembangkan usaha kerajinan rotan yang telah dijalankan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan untuk memulai usaha kerajinan rotan para pengrajin atau pelaku usaha menggunakan modal sendiri, namun ada juga yang diperoleh dari pihak terkait dan pemerintah atau pemerintahahn desa. Pengrajin/pelaku usaha pada Gampong Lamgaboh, Gampong Kueh, dan Gampong Lamcok memulai usaha kerajinan rotan dengan modal awal sendiri tanpa bantuan pihak pemerintah dan ada juga yang meminjam dari pihak perbankan. Akan tetapi pada Gampong Tanjong Pihak pemerintah desa sangat mendukung usaha kerajinan rotan dengan memberikan modal dari dana desa berupa membantu para pengrajin menyediakan bahan baku rotan untuk dianyam kemudian hasil produk dipasarkan di toko, namun pihak pemerintah desa tidak menampung semua produk yang dihasilkan oleh pengrajin karena hanya menampung sesuai kapasitas anggaran desa yang dianggarkan untuk usaha kerajinan rotan. Barang yang dipasarkan di toko hasil penjualannya akan dibagikan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama.

Modal berupa bahan baku yang telah diberikan tidak ada anggungan apapun tapi berbentuk hibah hanya pendapatannya yang dibagikan sesuai kesepakatan. Usaha kerajinan rotan ini sudah berjalan sebelum di bawah naungan BUMG Tanjong Adee Makmu, hasil olahan rotan pengrajin menjual kepada pemilik kede di luar gampong atau ke pasar. Melihat hal itu pihak pemerintah desa memasukkan usaha kerajinan rotan ke dalam Badan Usah Milik

Gampong agar produk yang dihasilkan oleh pengrajin dapat ditampung dan dipasarkan sehingga dapat membantu dan mengatasi penghambat yang dirasakan oleh pengrajin yaitu tempat atau wadah untuk memasarkan. Usaha kerajinan rotan di bawah naungan BUMG telah berjalan dari tahun 2020 hingga sekarang. Bantuan berupa modal dari pihak lainnya para pengrajin atau pelaku usaha ada yang belum pernah menerima. Para pengrajin atau pelaku usaha sangat mengharapkan perolehan bantuan modal dari pihak terkait atau lembaga-lembaga keuangan.

4.3 Dampak Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Usaha kerajinan rotan ini telah dilakukan pemberdayaan oleh pihak pemerintah atau pihak terkait yang dilihat dari bentuk pemberdayaannya. Setiap kebijakan atau upaya yang telah dilaksanakan pastinya adanya dampak positif yang dirasakan oleh penerima atau yang menjalani dari upaya yang telah dilaksanakan seperti dampak yang dirasakan oleh para pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan yang telah menjalani program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan baik daerah maupun desa. Adapun dampak pemberdayaan Usaha Kecil Menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian pada 4 (empat) Desa/Gampong di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang dirasakan oleh pengrajin atau pelaku usaha rotan

diantaranya yaitu: meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat, dimana dengan hadirnya bentuk pemberdayaan usaha kerajinan rotan masyarakat dapat memperoleh penghasilan atau pendapatan dari hasil penjualan produk rotan. Masyarakat atau pelaku usaha tanpa adanya ketergantungan dari pemberian bantuan dari pihak-pihak terkait, namun kini masyarakat atau pelaku usaha dengan adanya usaha kerajinan rotan telah adanya kemandirian yang dapat dilihat dari sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti dapat membiayai pendidikan sekolah anaknya, dapat membeli sepeda motor untuk alat transportasi sehari-hari, dapat membeli kebutuhan tersier seperti membeli perlengkapan rumah tangga.

Begitupun dampak selanjutnya yang diperoleh yaitu dapat membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Keberadaan usaha kerajinan rotan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat dimana dengan adanya usaha rotan yang dijalankan oleh seseorang atau pelaku usaha kerajinan rotan dengan pendapatan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mengakibatkan termotivasinya bagi masyarakat lain untuk membuka usaha rotan juga agar dapat merasakan keuntungan yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha yang membuka usaha. Peluang tersebut dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat agar menjadi pengrajin kerajinan rotan sehingga dapat direkrut oleh pelaku usaha untuk menganyam produk rotan. Oleh karena itu dengan meningkatnya pengrajin/pelaku usaha sehingga dapat

membuka peluang pekerjaan dan dapat mengatasi serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat, dimana dengan adanya program pemberdayaan pembinaan yang telah dilaksanakan seperti pelatihan atau training dapat memberikan pemahaman mengenai seluk beluk dunia usaha seperti cara manajemen usaha baik itu cara tata letak barang agar dapat menarik perhatian pembeli atau konsumen, menghasilkan produk yang berkualitas dan modern atau inovasi baru, cara memasarkan produk atau promosi yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti saat ini yang serba teknologi dapat memasarkan produk melalui sosial media yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lainnya, kemudian cara membuat pembukuan laporan keuangan sehingga dapat membantu melihat perkembangan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan yang dihasilkan, cara memperoleh modal dan lainnya. Pemberian pemahaman bertujuan agar masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi segala permasalahan atau kendala dan tantangan yang sedang dihadapi sehingga dapat mengaktualisasi kemampuan atau keterampilan yang telah didapatkan.

Membantu akses bagi pengrajin atau masyarakat dalam memasarkan produk, dengan adanya bentuk pemberdayaan seperti program kemitraan yang telah dijalankan dapat membantu akses yang tidak dapat dijangkau oleh para pengrajin atau masyarakat untuk memasarkan produk sehingga tidak adanya kerisauan

mengenai penjualan produk yang dihasilkan. Akses yang telah diberikan sangat berguna bagi pengrajin atau masyarakat karena dengan adanya akses tersebut para pengrajin tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai tempat menjual produk setelah dianyam, ketika sudah menganyam atau menghasilkan produk sudah ada tempat pemasok atau penampung produk.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak yang diperoleh oleh masyarakat atau pengrajin/pelaku usaha dengan adanya bentuk-bentuk pemberdayaan UKM kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian yaitu:

1. Meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat
2. Memberikan peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat
3. Membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat
4. Membantu akses bagi pengrajin atau pelaku usaha untuk dapat memasarkan produk yang telah dihasilkan

Usaha kerajinan rotan juga terdapat kendala-kendala dalam pengelolaannya, seperti keterbatasan modal, terbatasnya bahan baku, terbatasnya tenaga kerja yang kurang pemahaman mengenai rotan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Usaha Kecil menengah kerajinan rotan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di 4 (empat) Gampong (Lamgaboh, Kueh, Lamcok, dan Tanjong) Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Pemberdayaan usaha kerajinan rotan ini telah dilakukan oleh pihak pemerintahan desa maupun dinas UMKM dan lainnya baik dari bentuk program kemitraan, pembinaan/pendampingan, dan pembiayaan. Program kemitraan telah dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa, pihak terkait seperti Disperindag atau PLUT Aceh Besar, dan pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan. Gampong Tanjong merupakan satu desa yang pihak pemerintahan desa berkontribusi dan sangat mendukung usaha kerajinan rotan yang dijalankan oleh oleh pengrajin atau pelaku usaha, sedangkan tiga desa lainnya (Gampong Kueh, Gampong Lamcok, dan Gampong Lamgaboh) pihak pemerintahan desa juga sangat mendukung usaha kerajinan rotan yang dijalankan oleh pengrajin atau pelaku usaha namun tidak ikut langsung berkontribusi, tetapi para pengrajin atau pelaku

usaha langsung bermitra dengan pihak terkait yaitu Disperindag atau PLUT Aceh Besar. Begitu juga halnya program pembinaan/pendampingan pada Gampong Tanjong telah adanya bentuk pemberdayaan program pembinaan/pendampingan dari pemerintahan desa namun belum pernah adanya pembinaan/pendampingan dari pihak-pihak terkait, sedangkan pada tiga desa lainnya (Gampong Kueh, Gampong Lamcok, dan Gampong Lamgaboh) pemerintahan desa belum melakukan pembinaan/pendampingan namun pihak-pihak terkait seperti Disperindag/ PLUT Aceh Besar, BI, Disnaker, DinSos dan lainnya telah melakukan pembinaan/pendampingan dengan menyediakan atau melaksanakan kegiatan pelatihan atau training pada pengrajin atau pelaku usaha kerajinan rotan. Program pembiayaan para pengrajin telah mendapatkan berupa bahan baku seperti pada satu desa yaitu Gampong Tanjong dimana pihak pemerintahan desa menyediakan bahan baku, sedangkan tiga desa lainnya (Gampong Kueh, Gampong Lamcok, dan Gampong Lamgaboh) para pengrajin/pelaku usaha pertama kali menggunakan modal milik sendiri tanpa perolehan pembiayaan dari pihak-pihak terkait.

2. Pemberdayaan usaha kerajinan rotan ini adanya dampak-dampak positif dan kendala-kendala dalam proses menjalankan. Dampak positif yang dapat diperoleh yaitu pengrajin/pelaku usaha telah mampu meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat, memberikan peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat, membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat, membantu akses bagi pengrajin atau pelaku usaha untuk dapat memasarkan produk yang telah dihasilkan. Kendalanya yaitu keterbatasan modal, terbatasnya bahan baku, terbatasnya tenaga kerja terampil pengrajin.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran dari penulis bagi pengrajin, pihak pemerintahan desa atau pihak dinas terkait yaitu:

1. Bagi pihak dinas terkait sebaiknya melaksanakan pemberdayaan kepada semua pengrajin sehingga pengrajin dapat merasakan dan mengikuti program-program pemberdayaan yang diadakan seperti kegiatan pelatihan dan training, pemahaman dunia usaha. Sebagian besar para pengrajin belum mampu mengaplikasikan tata cara pemasaran online dan pembukuan laporan keuangan, maka sebaiknya pihak dinas terkait dapat melaksanakan pembinaan pemahaman mengenai aplikasi pemasaran online dan pembukuan laporan keuangan dan juga memperhatikan

kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengrajin baik dari kebutuhan penyediaan bahan baku, bantuan modal dan lainnya. Bagi sebagian pengrajin agar lebih terbuka mengenai apa yang dialami dalam menjalankan usahanya baik itu dari segi kesulitan yang dihadapi, dampak yang dirasakan dengan adanya usaha kerajinan rotan dan segala hal yang bersangkutan dengan usaha yang dijalankan.

2. Pelaksanaan program pemberdayaan sebaiknya juga dilakukan oleh pemerintahan desa agar usaha kerajinan rotan yang dijalani oleh masyarakat atau pengrajin terus berlanjut karena usaha ini sangat berpotensi baik dari pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Sebaiknya usaha ini dijadikan di bawah naungan BUMG agar dapat juga meningkatkan pendapatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Home Industri Tahu di Desa Landsbaw, Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*. Lampung: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Andini, Uly Hikma., H. Mochamad Saleh Soeaidy., & Ainul Hayat. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*. Malang: Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Anoraga, Pandji. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Basith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan.*, Malang: UIN Maliki Press.
- Bahri, Syaiful. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis – Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Cornelis dan miar. (2005). *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hermansyah, Tantan., & Muhtadi. (2013). *Manajemen Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

- Hafsah, M.J. (2004). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Jurnal Infokop Nomor 25 Tahun XX.
- Hadiman, R. (2016). *Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Propinsi Aceh.
- Hutomo, M, Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, diakses 27 April 2017, dari Mardi_2009101515035_0.pdf
- Ife, J., & Tesotiero, F. (2014). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2001). *Pengembangan Usaha Kecil Dan Kemitraan Dalam Buku Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta, UPP.AMP YKPN.
- Latumaerissa, Julius R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardikanto, (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa*. Jurnal PUBLICIANA.
- Nuari, Ahmad Raihan. (2010). *Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Medan: Jurnal Ekonomi Universitas Medan.
- Nurullah, Ira Zachra,. Aliyudin,. & Ali Aziz. (2017). *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Motekar Pengarajin Anyaman Bilik*. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.

- Papilo, Petir. (2014). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Rotan si Kota Pekanbaru*. Riau: Jurnal Kewirausahaan.
- Rosyidi, Suherman. (2019). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Mikro/Makro*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahmana, Arief. (2008). Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah,(online), <http://infoukm.wordpress.com>, diakses 1 oktober 2011
- Sajutawiningtyas, Riza. (2014). *Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Kalianak Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya*. Jurnal: Kebijakan dan Manajemen Publik.
- Saputro, Oki Dwi. & Heryanto Susilo. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di Sentra Industri Tepung Tapioka Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)*. Surabaya: Jurnal PLUS Universitas Negeri Surabaya.
- Subandi, (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Cetakan Keempat, Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, S. (2015). *Strategi Meningkatkan Daya Saing Umkm Dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA*. Buletin

Indonesia, Vol. 8, N. 70-170.

Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Edisi: Keenam.

Sukei, Tri Wahyuni., Azizah Irjayanti., Sekarsih Dyah Hapsari., & Ariko Efendi. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ekonomi dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal*. Jurnal Pemberdayaan : Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Sumodiningrat, Gunawan., & Ari Wulandari. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. (2011). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supadie, Didiék Ahmad. (2013). *Ekonomi Syariah dalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra.

Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.

Sofia, I. P. (2015). *Kontruksi Model Kewirausahaan Sosial Sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian*. Jakarta: Universitas Pembangunan Jaya.

Tambunan, T. (2012). *Profil dan Permasalahan Usaha Kecil di Indonesia*. Jakarta: ISEI Kadin.

Telegawathi, Ni Luh. Sayang., Ni Nyoman Yulianthini., & Ni Luh Silli Antari. (2016). *Pemberdayaann Industri Kecil Kerajinan Tangan melalui Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Gianyar Bali*. SENARI ke-4.

Tanjung, M. Azrul. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi*

Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wasana, Jaka., Kibrandoko., Gunawan Hutaauruk. (1997). *Economics*. Penerbit Erlangga, Edisi Ke-7.

Widjaja, I. Ngurah Rai. (2000). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Cetakan Pertama, KBI.

Winarni, Tri. (2008). *Pemberdayaan dan Pengelolaan*. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

www.bps.aceh.go.id/publication/2018/12/19/6a639f0e25a4929a0e3271ea/statistik-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-aceh.html

www.atjehwatch.com/perempuan-lhoknga-merajut-hidup-dengan-anyaman-rotan

www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html 24 Agustus 2020

Lampiran-1

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaku Usaha / Pengrajin	Apakah dengan hadirnya usaha kerajinan rotan dapat membantu perekonomian anda?	
		Apa saja bentuk pemberdayaanUKM kerajinan rotan yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait atau instansi-instansi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?	
		Bagaimana dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha/pengrajin dengan adanya pemberdayaanUKM kerajinan rotan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?	
		Apakah ada dukungan pembiayaan atau kerja sama dari pihak-pihak terkait?	
		Apakah pihak terkait ada melakukan peninjauan atau observasi baik sebelum atau sesudah diberikan program atau bentuk pemberdayaan?	
2.	Kepala Desa (Geuchik)	Apakah dengan adanya usaha kerajinan rotan ini	

		dapat meningkatkan perekonomian gampong dan membantu pihak masyarakat lainnya?	
		Apa saja bentuk pemberdayaanUKM kerajinan rotan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?	
		Apakah ada suntikan dana dari pihak pemerintahan desa untuk pelaku usaha kerajinan rotan?	
		Bagaimana dukungan dari pihak pemerintah desa dengan adanya usaha kerajinan rotan ini?	
3.	Dinas Koperasi dan UMKM/ Pusat Layanan Usaha Terpadu	Apa saja bentuk pemberdayaanUKM kerajinan rotan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?	
		Apa saja dampak pemberdayaanUKM kerajinan rotan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?	

Lampiran-2

Dokumentasi Wawancara



Gambar: wawancara dengan kepala desa Gampong Tanjong



Gambar: wawancara dengan kepala desa Gampong Kueh



Gambar: wawancara dengan kepala desa Gampong Lamgaboh



Gambar: wawancara dengan Sekdes Gampong Laamcok



Gambar: wawancara dengan pihak PLUT Aceh Besar



Gambar: wawancara dengan Ibu Aminah



Gambar: wawancara dengan Ibu Ferdiyanti yang sedang menganyam produk rotan



Gambar: wawancara dengan Ibu Cut



Gambar: wawancara dengan Ibu Yanti



Gambar: wawancara dengan Ibu Irawati



Gambar: wawancara dengan Ibu Hamnah yang sedang menganyam produk rotan



Gambar: wawancara dengan Ibu Nuraini yang sedang menganyam produk rotan